



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
RAPAT KERJA DENGAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA  
MINERAL REPUBLIK INDONESIA**

- Tahun Sidang : 2023-2024  
Masa Persidangan : IV  
Rapat ke- :  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Selasa, 19 Maret 2024  
Waktu : Pukul 15.02 WIB s.d. 17.29 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI  
**Gedung Nusantara 1, Jakarta Pusat**  
Ketua Rapat : H. Eddy Soeparno, S.H, M.H. (F-PAN/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI).  
Sekretaris Rapat : Dwiyanti, S.Sos./Kabagset. Komisi VII DPR RI  
Acara : 1. Evaluasi pelaksanaan program TA 2023;  
2. Program prioritas TA 2024;  
3. Pengawasan proses cabut hidup IUP;  
4. Evaluasi tarif listrik untuk industri dan bisnis di Batam;  
5. Lain-lain  
Hadir : 28 orang Anggota hadir dari 52 orang Anggota Komisi VII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

**A. Anggota DPR RI:**

**PIMPINAN :**

1. Sugeng Suparwoto/F-Nasdem/Ketua Komisi VII DPR RI
2. H. Dony Maryadi Oekon, S.T./F-PDI Perjuangan/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
3. Bambang Haryadi, S.E./F-Gerindra/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
4. H. Eddy Soeparno, S.H, M.H./F-PAN/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN:**

6 orang anggota dari 10 anggota:

1. H. Yulian Gunhar, S.H, M.H.
2. H. Nasyirul Falah Amru, S.E.
3. H. Andi Ridwan Wittiri, S.H.
4. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M.
5. Paramitha Widya Kusuma, S.E.
6. Ribka Tjiptaning Ploretariyati

**2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:**

5 orang anggota dari 7 anggota:

1. Ir. H. M. Ridwan Hisyam
2. Drs. Mukhtarudin
3. Ir. Lamhot Sinaga
4. Bambang Hermanto, S.E.
5. Bambang Patijaya, S.E., M.M.

**3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:**

2 orang anggota dari 6 anggota:

1. Moreno Soeprapto
2. Dr. Ramson Siagian

**4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:**

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. Arkanata Akram, S.T, BE (Hons), M.Eng.Sc.

**5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

3 orang anggota dari 5 anggota:

1. H. Abdul Kadir Kading, S.Pi., M.Si.
2. Hj. Ratna Juwita Sari, S.E, M.M.
3. H. Marwan Ja'far

**6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

2 orang anggota dari 5 anggota:

1. Sartono Hutomo.
2. Drs. Hendrik H. Sitompul, M.M.

**7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**

4 orang anggota dari 5 anggota:

1. Ir. H. Tifatul Sembiring
2. Dr. H. Mulyanto, M.Eng.
3. H. Nurhasan Zaidi, S.Sos.I.
4. Dipl. Ing hj. Diah Nurwitasari, MI.Pol.

**8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

1 orang anggota dari 3 anggota:

1. Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc.

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

0 orang anggota dari 1 anggota:

**B. PEMERINTAH/UNDANGAN**

1. Arifin Tasrif (Menteri ESDM)

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Ibu-Bapak Anggota Komisi VII, kita siap untuk mulai ya rapatnya.  
Baik, Pak Menteri kita bisa mulai ya.  
Baik, terima kasih.

*Bismillahirrohmanirrohim,  
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semua,  
Salam sehat,  
Selamat sore.*

Ibu-Bapak yang kami muliakan Pimpinan Komisi VII DPR RI,  
Yang kami muliakan Ibu-Bapak Anggota Komisi VII DPR RI,  
Yang kami hormati Menteri ESDM RI beserta seluruh jajarannya, serta para hadirin yang berbahagia.

Pada kesempatan yang baik di sore hari ini, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kesediaan Ibu-Bapak Anggota Komisi VII DPR RI, beserta Menteri ESDM RI dan seluruh jajarannya untuk hadir dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI.

Sesuai dengan undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan **IV** Tahun Sidang 2023-2024, pada hari ini Komisi VII DPR RI akan melaksanakan rapat kerja dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dengan agenda:

1. Evaluasi pelaksanaan program TA 2023;
2. Program prioritas TA 2024;
3. Pengawasan terhadap proses cabut hidup IUP;
4. Dan lain-lain.

Berdasarkan data dari sekretariat, Anggota Komisi VII DPR RI yang hadir telah berjumlah 24 anggota dari 8 fraksi yang ada, dengan demikian kuorum sebagaimana ditentukan telah terpenuhi dan setiap rapat di DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu Pimpinan meminta persetujuan Anggota Komisi VII DPR RI agar rapat ini dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan dan bersifat terbuka. Apakah dapat disetujui?

Atas persetujuan Anggota Komisi VII DPR RI dan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM kami menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 15.02 WIB)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

Sebelum melanjutkan rapat ini kami mintakan persetujuan Bapak-Ibu Anggota bahwa rapat ini selesai pada pukul 17.00 WIB atau 2 jam setelah rapat dimulai dan dapat diperpanjang jika diperlukan berdasarkan kesepakatan bersama, apakah dapat disetujui? Setuju ya, baik.

**(RAPAT : SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

Ibu-Bapak yang kami muliakan.

Sesuai dengan agenda yang telah kami bacakan tadi kami tanpa membuang waktu akan meminta Menteri ESDM RI beserta jajaran yang dipandang perlu untuk bisa menyampaikan materinya untuk kita pada sore hari ini.

Kami persilakan.

**F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):**

Izin Pak Menteri, sebelumnya interupsi sedikit.

Dulu kita sudah menjadwalkan bahwa pembahasan pencabutan IUP ini adalah bersama dengan Menteri Investasi, tapi sekarang *kan* hadir hanya Menteri ESDM, bagaimana ini Pak mohon dapat diinformasikan kepada kami.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Baik, kita telah menerima surat dari Komisi VI DPR RI yang menolak menghadirkan Menteri Investasi, tidak memberikan izin Menteri Investasi dalam rapat kita pada hari ini ya, demikian Pak Mul.

Baik kami persilakan Pak Menteri ESDM untuk bisa menyampaikan materinya kepada kami semua.

Silakan Pak.

**MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):**

Baik, terima kasih Bapak Pimpinan.

Yang kami hormati Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI, para kolega Kementerian ESDM, para hadirin yang berbahagia.



*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua.

Pertama-tama, kami ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah kita di Bulan Ramadhan ini senantiasa membawa keberkahan.

Izinkan kami untuk memperkenalkan pejabat Eselon I yang baru di lingkungan Kementerian ESDM yang baru saja kami lantik, yaitu yang pertama Dirjen Energi Baru Terbarukan Ibu Endah Listiana Dewi, kemudian Kepala Badan Geologi Bapak Muhammad Wafiq, kemudian Staf Ahli Menteri Bidang Rencana Strategis Pak Muhammad Idris Sihite dan Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam Ibu Lana Syariah.

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan amanah konstitusi, yaitu rapat kerja dengan agenda sebagai yang disampaikan tadi:

1. Evaluasi pelaksanaan program Tahun Anggaran 2023;
2. Program prioritas Tahun Anggaran 2024;
3. Pengawasan proses cabut hidup Izin Usaha Pertambangan;
4. Evaluasi tarif listrik untuk industri dan bisnis di Batam;
5. Agenda lain-lain yaitu terkait dengan surat kami terkait dengan perluasan tarif listrik curah untuk PLN.

Baiklah, kita memasuki agenda yang pertama evaluasi pelaksanaan program tahun anggaran 2023.

Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII yang kami hormati.

PNBP sektor ESDM di tahun 2023 dapat dicapai melebihi target realisasinya mencapai 300,3 triliun atau 116% dari targetnya yang 259,2 triliun. Kemudian investasi di sektor ESDM juga tetap terjaga, realisasinya mencapai 29,6 miliar US dolar atau meningkat 10% dibanding dengan tahun 2022.

Realisasi anggaran sebesar 6,18 triliun atau 90,06% dari pagu 6,8 triliun, sebagian anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan infrastruktur bagi masyarakat, antara lain:

- Pipa gas Cirebon-Semarang,
- Konkit nelayan,
- Konkit petani,
- PJUTS,
- PLTS,
- Bantuan alat masak listrik,
- Alat penyalur daya listrik dan konversi motor listrik.

Di sektor Migas:

- Realisasi *lifting* Migas sebesar 1.565 MBOEPD atau 88,95% dari target yang terdiri dari:



- *Lifting* minyak gas bumi sebesar 605.000 barel *oil per day* dan gas bumi sebesar 960.000 barel *oil per day*.
- Tahun 2023 telah dibangun jaringan gas sejumlah 950.000 sambungan rumah tangga. Realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 60,3 ribu sambungan rumah.
- Kemudian realisasi program BBM satu harga pada tahun 2023 sebanyak 89 lokasi sehingga sampai dengan saat ini terdapat 512 lokasi BBM satu harga.
- Pipa Cirebon-Semarang tahap 1 yaitu Semarang, yaitu Semarang sampai Batang telah terbangun sepanjang 60,5 kilometer dengan nilai investasi sebesar 1,04 triliun.
- Pendistribusian konkrit nelayan sejumlah 14.160 paket di 50 kabupaten kota, sedangkan konkrit petani sejumlah 39.465 paket di 69 kabupaten kota.

Di subsektor listrik dan EBTKE:

- Rasio elektrifikasi meningkat menjadi 98,33%, penambahan kapasitas terpasang pembangkit EBT tahun 2023 sebesar 539 megawatt. Sehingga total kapasitas terpasang pembangkit EBT di tahun 2023 mencapai 13.155 megawatt.
- Pemanfaatan biodiesel tahun 2023 sebesar 12,2 juta kilo liter yang mampu mengurangi impor BBM dan menghemat devisa sebesar 120,5 triliun rupiah.
- Ekosistem kendaraan listrik terus dipercepat hingga tahun 2023 telah terbangun 932 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU dan 1.772 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum atau SPB KLU.

Di subsektor Minerba:

- Produksi batubara tahun lalu 2023 sebesar 775 juta ton atau 112% dari target 2023 sebesar 695 juta ton,
- Pemanfaatan domestik sebesar 213 juta ton atau 121% dari targetnya 177 juta ton.

Pemerintah juga terus mengawal hilirisasi mineral terdapat 16 pembangunan fasilitas pemurnian mineral terintegrasi, sehingga tahun 2023 telah terdapat 2 smelter yang telah beroperasi dan 11 lainnya sedang dalam tahap penyelesaian.

Di sektor geologi, antara lain:

- Pembangunan jaringan pemantauan air tanah dan stasiun pengaman, stasiun pengamatan penurunan permukaan air tanah sebanyak 20 unit di 6 kabupaten dan kota.
- Terdapat 236 lokasi situs warisan geologi atau geo heritage yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia hingga tahun 2023.
- Terdapat penambahan 4 Geopark Global UNESCO, yaitu untuk Maros Pangkep, Ijen, Merangin dan Raja Ampat, serta penambahan satu geopark nasional yaitu Ujung Kulon.

Untuk meningkatkan kualitas ESDM telah dilakukan Diklat, antara lain:

- Diklat industri sebanyak 33.200 orang,
- Sertifikasi kompetensi sejumlah 28.590 orang,
- Diklat masyarakat 1.689 orang, serta
- Nilai indeks profesionalitas ASN ESDM 87,98.

Terkait dengan rencana umum energi daerah telah ditetapkan 33 Perda RUED provinsi.

Selanjutnya kami sampaikan program prioritas di tahun anggaran 2024.

Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII yang kami hormati.

Pagu anggaran Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2024 sebesar 6,8 triliun, sebagian anggaran Kementerian ESDM dialokasikan untuk kegiatan infrastruktur bagi masyarakat, pengelolaan survei sumber daya alam dan mitigasi bencana geologi dengan target, antara lain:

- a. Pipa gas bumi Cirebon-Semarang tahap 2, pembangunan tahap 2 Batang-Cirebon sampai Kandanghaur Timur,
- b. Konkit nelayan 15.000 paket,
- c. Konkit nelayan 19.000 paket,
- d. Perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur migas ada 5 kegiatan,
- e. Bantuan pasang baru listrik adalah 80.000 rumah tangga,
- f. Perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur EBTKE ada 5 kegiatan, yaitu:
  - Pembangunan PLTM 1 unit di Papua,
  - Kemudian PLTMH ada 5 unit,
  - PLTS terpadu 11 unit,
  - Ada revitalisasi PLT EBT 5 unit, dan
  - Konversi motor listrik 10 unit.
- g. Kemudian juga sistem mitigasi bencana geologi ada 13 kegiatan, kemudian juga renovasi rehabilitasi 40 pos pengamatan gunung api, kemudian Pusat Informasi Geologi ada di 4 lokasi dan ada 4 rekomendasi untuk warisan geologi dan geopark, kemudian survei prospekan sumber daya alam ada lima kegiatan dan dilakukan pemantauan air tanah dengan jumlah 6 kegiatan.

Hingga tanggal 16 Maret 2024 pengadaan barang dan jasa sejumlah 441 paket kegiatan strategis, 137 paket dilaksanakan dengan mekanisme tender seleksi dan 304 paket nontender, sebanyak 127 paket telah berkontrak yaitu 27 paket tender dan 100 paket nontender.

Kemudian kami sampaikan pengawasan proses cabut hidup izin usaha pertambangan.

Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII yang kami hormati.

Sesuai Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara IUP atau IUPK dapat dicabut oleh menteri jika pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan IUPK, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemegang IUP dan IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau pemegang IUP dan atau IUPK dinyatakan pailit. Salah satu kewajiban pemegang perizinan pertambangan adalah penyampaian rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB tahunan, yang apabila tidak dilaksanakan dianggap tidak berkegiatan dan dapat diberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Kronologis pencabutan IUP adalah sesuai arahan pada rapat terbatas Bulan Januari 2022, di mana sebanyak 2.343 IUP dianggap tidak berkegiatan. Dari 2.343 IUP sebanyak 2.178 dianggap tidak melaksanakan rencana kerja dan anggaran biaya perusahaan. DKPM Kementerian Investasi mendapatkan mandat untuk melaksanakan pencabutan dari Bcculan Januari sampai dengan November 2022, namun pemerintah masih tetap memberikan ruangan untuk pengajuan keberatan atas pencabutan IUP dengan catatan perusahaan bisa menyampaikan data-data pendukung yang cukup.

Selanjutnya dengan mekanisme yang ada berdasarkan verifikasi oleh Satgas Penataan Lahan dan Penataan Investasi, beberapa perusahaan dibatalkan pencabutannya karena telah dianggap telah memenuhi persyaratan. Telah kami jelaskan bahwa penyebab dicabutnya izin tambang adalah pada dasarnya perusahaan minyak tidak menyampaikan RKAB sampai dengan tahun 2021, maupun perusahaan dianggap pailit.

Namun Satgas Penataan Lahan dan Penataan Investasi masih memberikan ruang untuk menghidupkan kembali IUP yang dicabut melalui prosedur pengajuan keberatan pencabutan. Di mana pemerintah menetapkan kriteria dan evaluasi atas upaya administratif keberatan IUP yang dicabut sebagai berikut:

Untuk tahap operasi produksi, perusahaan telah mendapatkan persetujuan RKAB tahun 2021 atau dari 2017-2020. Perusahaan mengajukan permohonan RKAB 2022 yang telah diterima oleh Ditjen Minerba atau realisasi penyerapan biaya RKAB tahun 2021 perusahaan lebih besar atau sama dengan 50% atau perusahaan telah menyelesaikan semua kewajiban PNPB sampai dengan tahun 2021 atau perusahaan memiliki kemampuan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sampai dengan RKAB tahun 2022 atau sedang menyelesaikan perizinan bidang kehutanan PPKH dan lain-lain dengan, atau dengan perkebunan atau masih ada sengketa hukum dan MoU dengan *end-user*, antara lain dengan PLTU ataupun juga dengan industri semen.

Untuk tahap operasi eksplorasi:

- a. Perusahaan telah mendapatkan persetujuan RKAB tahun 2021,
- b. Perusahaan telah mengajukan permohonan RKAB 2021 dan mengajukan permohonan RKAB 2022 dengan syarat ada bukti penyampaian permohonan,





- c. Perusahaan menyelesaikan semua kewajiban PNBPN sampai dengan tahun 2021, dari 2.078 IUP yang ditargetkan untuk dicabut oleh BKPM saat ini hanya 2.051 IUP, terdiri dari:
- 1.749 IUP mineral dan 302 IUP batubara yang sudah dicabut berdasarkan SK Pencabutan.
  - Sedangkan 27 IUP yang tidak dicabut terdiri dari 8 IUP di Aceh karena Otsus,
  - Kemudian 12 IUP batuan karena kewenangan gubernur,
  - Kemudian 1 IUP aspal karena kebijakan presiden,
  - 2 IUP sudah berakhir dan
  - 4 IUP sudah dicabut 2 kali.

Sampai dengan 14 Maret 2024 sebanyak 585 IUP telah dibatalkan pencabutannya oleh IBKPM, terdiri dari 499 IUP mineral dan 86 IUP batubara, namun baru 469 IUP yang sudah masuk dalam sistem Minerba One Data Indonesia atau MODI, juga dengan MOMI. Sisanya sebanyak 4 IUP dalam proses masuk MODI dan 112 belum bisa masuk MODI dikarenakan masih memiliki kewajiban penyelesaian pembayaran PNBPN.

Dapat kami jelaskan bahwa terkait data pencabutan dimaksud data pencabutan IUP oleh BKPM di Ditjen Minerba direkap berdasarkan email pemberitahuan dari BKPM kepada perusahaan yang ditembuskan kepada Ditjen Minerba. Pencabutan terhadap IUP dalam daftar pencabutan IUP melalui SK yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi, Kepala BKPM dan apabila terdapat perbedaan jumlah dalam data pencabutan IUP antara Ditjen Minerba dan BKPM dimungkinkan adanya pencabutan IUP oleh Menteri Investasi, Kepala BKPM yang tidak atau belum dikirimkan tembusannya ke Ditjen Minerba.

Selanjutnya kami sampaikan agenda selanjutnya yaitu evaluasi tarif listrik untuk industri dan bisnis di Batam.

Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati.

Tarif tenaga listrik PLN Batam ini mengacu kepada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2017 dan dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 jo Nomor 6/2023 bahwa "penetapan penyesuaian tarif menjadi kewenangan menteri dan untuk perubahan tarif memerlukan persetujuan DPR".

Sejak tahun 2017 tarif PLN Batam tidak pernah dilakukan penyesuaian karena pada saat tersebut memang belum disetujui oleh gubernur. PLN Batam tidak menerima subsidi dari pemerintah untuk rumah tangga 450 VA dan 900 VA dan sosial 450 VA sampai dengan 2.200 VA yang tarifnya sama dengan PLN persero yang bersubsidi. Porsi terbesar penjualan listrik adalah untuk pelanggan bisnis, antara lain hotel, mall, data center dan industri sebesar 2/3 dari total penjualan.

Selisih biaya pokok penyediaan atau BPP dengan tarif listrik yang diterapkan ditanggung oleh seluruhnya oleh PLN Batam. Untuk mengurangi

beban keuangan PLN Batam bekerja sama dengan PLN Persero, seperti kerjasama untuk IPP melistriki Bintan, Riau, Nias, Bangka Belitung, Lombok, Pontianak dan Sulawesi Selatan sehingga PLN Batam tidak optimal dalam melayani kelistrikan di Batam, termasuk ketidakmampuan dalam berinvestasi.

Untuk triwulan 2 tahun 2024 PLN Batam mengusulkan implementasi tarif *adjustment* pada 19 golongan tarif untuk memperoleh margin 6,62% untuk menutup kerugian yang minus 0,02%. Pemerintah dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi saat ini dan serta daya saing industri, penyesuaian tarif PLN Batam belum dapat diterapkan oleh pemerintah dan akan diputuskan nanti menjelang Juni tahun 2024, tidak ada kenaikan tarif.

Terdapat 15 wilayah usaha ketenagalistrikan di Kepulauan Riau, 7 wilayah usaha telah beroperasi di mana 4 di antaranya berada di Batam, antara lain: PLN Batam, kemudian Panbil Utilitas Sentosa, Tunas Energi dan Batam Indo Investment Cakrawala.

Selanjutnya kami usulkan satu agenda yang terkait dengan apa agenda lain-lain, ini terkait dengan usulan perluasan tarif tenaga listrik PLN yang kami dapat sampaikan sebagai berikut:

- PT PLN mengusulkan perluasan golongan tarif dengan tidak merubah besaran tarif tenaga listrik yang telah ada,
- Tujuan perluasan tarif adalah untuk meningkatkan pelayanan, efisiensi dan keandalan tenaga listrik yang lebih optimal bagi masyarakat dengan mempertimbangkan investasi peralatan dalam penyambungan listrik, pengendalian susut jaringan dan efisiensi penggunaan lahan untuk infrastruktur listrik kepada pelanggan.
- Sesuai Pasal 34 Undang-Undang 32/2009 tentang Ketenagalistrikan bahwa usulan penetapan tarif perlu mendapatkan persetujuan DPR RI.

Secara rinci usulan perluasan golongan tarif adalah sebagai berikut:

1. Traksi tegangan tinggi untuk kereta listrik dengan daya 30.000 kva, usulan ini untuk memenuhi kebutuhan listrik transportasi publik yang baru seperti MRT, LRT dan juga kereta cepat.
2. Curah tegangan rendah dan tegangan tinggi, daya tegangan rendah sampai dengan 200 kva dan tekanan tegangan tinggi 30.000 ke atas.
  - Usulan perluasan curah tegangan rendah adalah untuk mendukung stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum atau SPBKLU.
  - Usulan perluasan curah tegangan tinggi adalah dukungan listrik untuk wilayah usaha, antara lain untuk wilayah usaha industrial estate dan industrial park di Jawa Timur, di Jawa Tengah, Jawa Barat serta di Krakatau daya listrik dan juga yang lainnya.
3. Bisnis tegangan tinggi untuk sektor bisnis tegangan tinggi B3 daya 30.000 kva ke atas, usulan perluasan adalah untuk mendukung data center seperti Microsoft, Amazon, web service dan lainnya.

4. Rumah tangga tegangan menengah dengan daya di atas 200 kva, ini untuk sektor rumah tangga mewah dan keluarga yang sangat mampu.

Manfaat dari perluasan tarif ini adalah:

- a. Bagi pelanggan untuk memastikan kebutuhan daya listrik dapat terpenuhi secara optimal,
- b. Bagi pemerintah dapat menciptakan lingkungan bisnis yang menarik dan menjaga fiskal negara,
- c. Untuk PLN kenaikan revenue dan juga mengoptimalkan produk energi untuk lebih efisien.

Hasil *focus group discussion* Kementerian ESDM, Komisi VII dan PLN pada 14 Maret 2024 bahwa usulan perluasan tarif ini akan disosialisasikan dulu dengan baik kepada masyarakat sehingga dapat diterima dan dipahami tidak berdampak pada tarif listrik.

Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati.

Demikian penjelasan kami mengenai topik yang diagendakan pada hari ini, selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan.

Terima kasih.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih, Pak Menteri.

Ada yang mau sampaikan lagi mungkin dari pejabat terkait Pak? Sudah cukup, cukup.

Baik, kalau begitu kami lanjut dengan mendengarkan tanggapan, pandangan dari rekan-rekan Anggota Komisi VII yang hadir pada kesempatan ini. Kami mulai seperti biasa dari rekan-rekan dari PDIP.

Silakan Ibu Paramita.

**F-PDIP (PARAMITA WIDYA KUSUMA, S.E.):**

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VII dan Rekan-rekan Komisi VII, dan Yang saya hormati Pak Menteri beserta jajarannya.

Terkait agenda kita yang ketiga yaitu pengawasan proses cabut hidup IUP dan memang sedang ramai juga Pak Menteri, saya tahu Pak Menteri juga ketika diwawancara sudah mengatakan bahwa tidak ada tumpang tindih tugas antara ESDM dengan Kementerian Investasi yang dipimpin oleh Pak Bahliil terkait pencabutan IUP. Di agenda rapat kita disebutkan bahwa Kementerian ESDM melakukan pengawasan terhadap IUP yang dicabut izin hidupnya oleh Satgas dari Kementerian Investasi.

Yang saya ingin tanyakan dan yang saya ingin memperoleh penjelasan dari Pak Menteri, sebenarnya izin IUP itu siapa yang berwenang mencabut Pak? Karena setahu saya di Undang-Undang Minerba itu jelas bahwa yang berhak mencabut adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara, yakni Kementerian ESDM.

Berarti yang disebut pada agenda kita hari ini bahwa Kementerian ESDM melakukan pengawasan terhadap proses pencabutan IUP itu sebenarnya tidak cukup tepat, selain melakukan pengawasan harusnya Kementerian ESDM lah yang mencabut atau menghidupkan izin IUP tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Saya ingin tahu tanggapan Bapak terkait persoalan ini Pak Menteri.

Terima kasih.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Baik, terima kasih.

Dari Fraksi Partai Golkar, silakan Pak Mukhtar.

**F-GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):**

Terima kasih.

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang saya hormati, Bapak Menteri dengan seluruh Dirjen, BPH Migas, SKK Migas juga hadir pada kesempatan sore hari ini, Selamat melaksanakan ibadah puasa bagi yang berpuasa.

Yang pertama-tama tentu ada yang harus di apresiasi dan juga ada dikoreksi, terkait apresiasi tentu hal-hal yang melebihi target seperti PNPB dan investasi untuk menjaga ini perlu apresiasi kepada Menteri ESDM, kementerian dan seluruh jajarannya, sehingga bisa menjaga pendapatan negara dari sektor mineral ini.



Kemudian terkait dengan subsektor listrik dan EBTKE, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama soal rasio elektrifikasi, ratio elektrifikasi memang sih 98,33% tapi dari 98,33% ini belum seluruhnya itu adalah dialiri oleh listrik dari PLN atau negara. Oleh karena ini, ini menjadi sebuah pekerjaan rumah yang masih besar terkait dengan masalah elektrifikasi nasional, khususnya daerah 3 T.

*Nah* dalam Rapat Badan Anggaran pada waktu yang lalu, khususnya Panja Belanja Pusat dalam kebijakan dan saya juga masuk dalam Panja Belanja Pusat bahwa salah satu kebijakan yang diberikan dalam rangka percepatan elektrifikasi melalui listrik desa karena waktu itu kita bicara PMN untuk PLN tidak dikasih oleh Menteri Keuangan. Sehingga listrik desa itu dulu yang rasanya PMN sekarang harus mencari sumber BBM lain, ketika kita kejar Menteri Keuangan waktu itu Menteri Keuangan belum bisa memberi kepastian dari sumber dana yang mana.

Sehingga komprominya waktu itu adalah kita mencantumkan dalam kebijakan, maka dalam kebijakan kesimpulan Rapat Belanja Pusat itu dalam kesimpulan dan dilaporkan juga pada paripurna dan pengambilan keputusan tahap pertama dan tahap kedua APBN 2024 bahwa listrik desa itu percepatan saja melalui disatukan dalam kebijakan.

Jadi pemerintah terikat dalam kesimpulan kebijakan itu, artinya pemerintah wajib menyiapkan anggaran pembiayaan terhadap listrik desa. Khususnya kayak Kalimantan Tengah itu kan masih juga masih ada 400-an lebih yang masih belum teralirisi listrik desa, bahkan ada kecamatan yang belum lagi adalah 3 T yang lain, Papua, Maluku dan lain-lain. *Nah* listrik desa ini *kan* termasuk program prioritasnya Presiden Jokowi yang harus selesai di tahun 2025, iya harus selesai. Nah kalau pemerintah tidak menyiapkan anggaran ya **(tidak ada suara rekaman terputus 32.16-32.28)**.

Selain itu negara wajib hadir memberikan energi bagi rakyatnya, listrik jadi barang langka, listrik jadi barang mewah di desa-desa terpencil, sudah 70 sekian tahun kita merdeka tapi masih banyak desa kita yang belum menikmati listrik, masih hidup dalam kegelapan. Bahkan harus menswadayakan diri sendiri untuk menikmati listrik, harus beli solar, beli mesin, bahkan beli, beli apa namanya PLTS atap sendiri yang penting terang. Ini juga sama dengan kemiskinan bagi negara-negara yang sudah miskin.

Oleh karena itu maka pemerintah saya kira wajib menyiapkan ini, kalau opsinya PLN dari PMN tidak ada, apa opsi lainnya, *plan* duanya apa, *plan* bnya apa agar listrik desa tetap bisa dilanjutkan tahun 2024 sampai tahun 2025 ini. Sehingga bisa memenuhi keadilan energi bagi masyarakat.

*Nah* perlu saya ingatkan bahwa ini tercatat dalam kebijakan kesimpulan Rapat Badan Anggaran dengan pemerintah, jadi ini saya mengikat secara undang-undang, itu terkait dengan listrik desa.

Kemudian terkait dengan masalah EBTKE, khususnya PJUTS. Ini mohon maaf untuk tahun 2024 ini, PJUTS tahun 2023 meskipun ada kendala, ada hambatan tapi masih bagus, tapi 2024 khususnya di dapil saya Kalimantan Tengah sampai hari ini PJUTS itu belum selesai pembangunannya, eh 2023 itu belum selesai, belum selesai dikerjakan, bahkan 2024 katanya sudah tidak ada lagi, sudah tidak ada untuk PJUTS. Apakah masih ada? Sudah *nggak* ada ya kalau *nggak* salah ya.

*Nah* 2023 ini sampai sekarang belum selesai, saya sudah Maret mau katanya kemarin awal Maret sampai sekarang sudah pertengahan Maret, bahkan mungkin akhir Maret masih banyak daerah-daerah yang belum terpasang. Jadi oleh karena ini menjadi catatan, bahkan ada pemenang tender kesulitan keuangan, *kan* aneh juga ini.

Saya bingung kenapa ini terhambat Pak, kami kesulitan keuangan, loh kalian pemenang, kenapa uang *nggak* ada? Harusnya *kan* sebelum menang *kan* sudah diukur kekuatan-kekuatan pemenang ini uangnya seperti apa, sehingga tidak mengganggu proses konstruksi.

Ini buat catatan kita untuk PJUTS dan hampir terjadi di seluruh Indonesia karena hampir semua teman-teman mengeluh soal PJUTS tahun 2023 ini, belum soalnya lambat konstruksinya, belum lagi kalau rusak lambat juga perbaikannya. Bahkan sudah dipasang mati dibiarkan aja, lama-lama kontraktornya *nggak* bertanggung jawab lagi. Jadi ini tolong nanti ini menjadi pencatatan penting dalam rangka kita mengevaluasi pada tahun 2023 ini.

Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan revisi Perpres Pak Menteri, kaitannya revisi Perpres 191 Tahun 2014. Ini *kan* sudah isunya *kan* sudah liar di masyarakat tentang masalah pembatasan penggunaan BBM bersubsidi ya. Dari dulu memang kita meminta agar percepatan ada proses revisi perpres, lampiran perpres ini agar tidak menjadi bola liar yang membuat persepsi yang macam-macam di masyarakat.

Pertanyaan kita kapan ini bisa diterapkan, kapan ini selesai revisi Perpres 191/2014 ini terkait dengan kejelasan kriteria, sehingga dapat dijadikan acuan dalam sistem distribusi BBM bersubsidi. Ini juga dalam rangka menjaga memudahkan pengawasan dan *monitoring* di lapangan, jadi ini kapan, kapan ini bisa karena *kan* sudah isunya sudah berkembang di masyarakat kita ditanya wartawan sudah beberapa hari ini bagaimana, setujukah, setuju, setuju, sampai hari ini juga kita belum tahu formulasinya seperti apa tentang pembatasan BBM bersubsidi itu. Kalau mobil bersubsidi maksudnya seperti apa.

*Nah* kemudian walaupun misalnya harus dilakukan pembatasan CC khususnya yang motor maupun mobil ya paling *nggak* CC yang besar dulu lah prioritas, jadi bertahap jangan di pukul rata. Jadi posisinya yang paling besar itu dulu yang diberikan pembatasan, baru dalam rangka untuk menjaga gejolak secara nasional sosialnya, ekonominya pada masyarakat, sehingga ini gejolaknya dapat kita antisipasi.

Dan yang terakhir yang paling penting adalah kalau ini revisi sudah selesai ya, kemudian lampiran sudah selesai tolong regulator itu menjadi motor terdepan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Operator dalam hal ini Pertamina dan lain-lain tentu akan mem-*backup*, tapi yang inisiator dan stakeholder terkait yang paling penting *leading*-nya adalah di regulator untuk melakukan sosialisasinya kepada masyarakat tentang perpres itu.

*Nah* itulah beberapa pertanyaan yang saya sampaikan sehingga ini bisa memberikan penjelasan dan pencerahan kepada masyarakat terkait dengan isu masalah pembatasan BBM bersubsidi atau lebih tepatnya pengaturan distribusi daripada BBM bersubsidi. Kalau pembatasan itu maknanya mereka nanti subsidi mau dikurangi kira-kira *gitu* lah, jadi kira-kira pengaturan atau diksi yang dipakai adalah pengaturan ya daripada distribusi BBM bahan bakar bersubsidi ini.

Terima kasih Ketua.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Mukhtarudin.

Jadi Ibu Dirjen EBTKE yang baru ini ada PR bagi ibu untuk menuntaskan masalah PJUTS yang ini relatif sudah berjalan 2 tahun agak tersendat-sendat Bu, ini PR bagi kita semua.

Baik, lanjut dari Fraksi Partai Gerindra, Pak Ramson silahkan.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera untuk kita semuanya,

Pak Ketua dan teman-teman Anggota Dewan yang terhormat,  
Pak Menteri dan para Dirjen jajaran yang saya hormati.

Terima kasih atas pemaparannya Pak Menteri.

Karena ini langsung *to the point* ini mengenai kinerja sektor ESDM tahun 2023 karena ini saya memberikan respons terhadap apa yang tertera di penjelasan Pak Menteri. Memang dari target-target ini banyak yang tidak tercapai, seperti *lifting* minyak bumi itu tidak tercapai, juga mengenai jaringan gas tidak tercapai, pembangkit EBT ditargetkan 13.155 megawatt, hanya 539 megawatt yang ada penambahan. Itu yang dari sektor migas dan subsektor listrik.

Terus di sini tidak disampaikan bahwa PJ UTS itu sektor energi EBTKE yang juga parah di lapangan Pak Menteri. Jadi ini saya lihat maaf aja Kementerian ESDM mengelola satu *project* itu lemah, termasuk juga yang namanya *rice cooker* berantakan di lapangan. PJUTS juga berantakan sampai hari ini masih banyak yang belum selesai, ini soal bagaimana manajerial ini. Manajerial bahwa *how*, bagaimana praktisnya di lapangan. Jadi ini uang negara, uang rakyat Pak, saya kecewa juga kok begini Kementerian ESDM.

Itu *rice cooker* juga babak belur di lapangan itu, biar tim saya semua sampai heran. Biarpun dari jatah yang ada di dapil saya itu hanya 1.000 yang direalisasikan di sana, itu *nggak* benar *tuh*. Tolong dijelaskan juga supaya publik tahu kalau ada *project-project* untuk kementerian itu harus di-*manage* secara baik Pak, supaya efektif untuk rakyat. Juga PJUTS, itu pembangunannya dibangun hanya baru bikin pondasinya tapi *nggak* dibangun juga.

Tadinya rakyat juga mengharap, waduh ini perjuangannya Anggota Dewan kita, wakil kita luar biasa katanya, tapi tunggu-tunggu enam bulan juga *nggak* naik-naik dia tiangnya. Kita jadi malu, akhirnya tim kita ini lobi-lobi terus ke rakyat, sabar, sabar, sabar melulu. Lama-lama pas mau pemilu mereka juga enggak sabar udah, ini *nggak* benar nih janji melulu katanya. Maksudnya janji diperjuangkan *gitu*, *kan* itu kita kita perjuangkan, untung masih terpilih *alhamdulillah*.

Jadi ini *nggak* benar semuanya, aduh, ini malah kontra-produktif karena kita janji-janji tapi *nggak* direalisasikan. Kita janji kita perjuangkan supaya penerangan di jalan gelap ini jadi terang, yang mau ke mushola jadi terang, mau ke makam jadi terang ya, yang mau ke sekolah yang terang yang banyak jalan yang muda-mudi suka nongkrong jadi terang, iya, tapi *nggak* terang-terangan juga.

Ini Pak Menteri, ini soal bagaimana manajerial ini Pak bintang tiga purnawirawan ada di situ soal manajerial Pak, itu operasional di lapangan. Saya juga dulu lama rekanan TNI-AL Pak, 10 tahun, zaman tahun masih saya umur 23 sampai umur 33 beberapa Panglima Kodim *(suara tidak jelas 42.50)* teman saya, bintang-bintang dua, masih muda saya.

Iya sekarang lebih muda lagi milenial, iya betul Pak, Pak Haji Wagiman itu dulu cs saya itu, *kental saya*, Pak Supangat cs saya itu, bintang-bintang 2 top dulu zaman mereka angkatan 60 sama 61, saya masih muda waktu itu. Jadi memang harus ini kalau memimpin itu ya, pas mulai reformasi, kalau *nggak* reformasi saya *nggak* jadi DPR RI, beda dengan Pak Ridwan iya *kan*, iya makanya saya *kan* hanya reformasi aja, *alhamdulillah* 5 periode. Jadi itu saya ke rakyat aja, bisnis saya juga saya tinggalkan untuk karena reformasi ini, iya sama dengan periode dengan Pak Menteri, mantan menteri maksud saya.

Jadi itu Pak Menteri, maksud saya soal manajerialnya perlu juga keras kepada pelaksana, Manager Pelaksana. Kalau kita baik-baik aja waduh namanya semua, waduh udah tahu lah kita kadang-kadang perlu keras itu. Itu



yang dua itu yang langsung di lapangan saya lihat Pak Menteri, jadi itu menjadi catatan.

Terus yang 2024 ini sampai sekarang PJUTS *nggak* ada lagi, ini konkit nelayan, konkit petani mudah-mudahan ini bagus. Konkit petani juga perlu diperhatikan Pak Menteri bahwa itu *kan* namanya rakyat petani yang mau memperoleh itu, itu *kan* harus dicari datanya, artinya orangnya, petaninya yang pas untuk memperoleh pompanya atau konkit-nya.

Itu diperhitungkan anggaran operasionalnya, jangan sampai anggaran yang melaksanakan kondisi itu baik dari Kementerian ESDM, maupun dari Pemda, maupun dari tim-tim itu tidak ada, seperti kemarin saya untuk di kabupaten Pematang untuk seribu konkit saya keluarkan anggaran 74 juta Pak Menteri, operasional supaya bersih. Jadi tidak ada pungutan kepada si petani 1 rupiah pun, artinya sehingga viralnya, tis, tis, tis gratis, betul-betul gratis, tidak ada pungutan.

Jadi kalau kita memberikan gratis diupayakan di anggarannya, tapi kalau *nggak* diberitahu bahwa ini artinya Anggota Dewan yang memperjuangkan untuk dapil ini harus mempersiapkan anggarannya sendiri, jadi kita tahu, kalau tidak tahu kita biarkan tahu-tahu ada pungutan di lapangan bahaya juga Pak Menteri. Hal-hal seperti itu informasi buat Pak Menteri untuk disampaikan ke tim operasional di level dirjen dan juga ke level direktur Pak Menteri.

Terus yang berikutnya itu terakhir soal izin-izin ini, yang ini memang sangat ini tolong jelaskan ini kenapa ini banyak ini dicabut-cabut ini oleh malah, oleh BKPM mineral 1.749 IUP, batubara 302 IUP, total 2.501 IUP dan ini sudah menjadi opini publik. Nanti tolong dijelaskan secara detail supaya publik juga mendengarkan.

Demikian Pak Menteri, Pak Ketua terima kasih.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih.

Berikut dari Fraksi Partai Nasdem ada? Tidak ada.

Dari PKB silakan Ibu Ratna.

**F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Yang kami hormati Bapak Ketua dan sahabat-sahabat Komisi VII,  
Yang kami banggakan Pak Menteri beserta para Dirjen dan juga ada Kepala BPH Migas, Kepala SKK Migas semuanya saja.

Terima kasih paparannya Pak Menteri.

Yang pertama, tentu kita juga harus memberikan apresiasi begitu ya terkait capaian PNBPN yang ini kalau menurut halaman 6, memang dari tahun ke tahun relatif naik *gitu* ya memang selalu di atas target *gitu*. Cuman selain kita memberikan apresiasi Pak Menteri, dalam hal ini saya juga ingin bertanya apakah ini memang betul-betul karena maksimalnya kinerja Kementerian ESDM ataukah karena kurang maksimalnya kinerja dari teman-teman yang ada di perencanaan, itu juga harus kita evaluasi.

Jadi kalau misalnya tren target pencapaian PNBPN ini selalu naik, kenapa kok teman-teman yang ada di perencanaan ini selalu agak-agak tidak optimis *gitu* loh saat menetapkan target. *Nah* menurut saya ini juga perlu dikaji lagi *gitu* Pak Menteri, meskipun kalau untuk kami yang ada di Komisi VII ini sudah menjadi pondasi yang sangat luar biasa supaya kita bisa lagi-lagi menagih ke Kementerian Keuangan untuk bisa memberikan tambahan alokasi anggaran kepada Kementerian ESDM begitu ya. Udah kita sepakati dari kemarin-kemarin sih memang cuman ya ini sekedar apa ya semacam introspeksi internal *gitu* ya, walaupun kami mengapresiasi tapi tetap aja ada tanda di situ begitu.

Yang berikutnya Pak Menteri, semoga *nggak* bosan-bosan ya dari tadi ini semuanya rekan-rekan memang ya kita terima kasih program dari Kementerian ESDM ini bisa nyampai ke Dapil masing-masing, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat *gitu* terima kasih. Cuman memang yang menjadi ganjalan luar biasa itu AML dan PJUTS, Pak.

Pertama terkait sosialisasi, kami itu agak-agak gimana *gitu* ya kalau misalnya dari pejabat-pejabat Kementerian ESDM itu belum apa-apa udah suka statement *gitu* loh di luaran terkait AML yang mengakibatkan itu ricuh, sehingga kita itu mengawalinya juga luar biasa *kan* di Kementerian Keuangan dan Bappenas *gitu kan*.

Mohon oknum-oknum yang model begini nih dikasih teguran lah Pak, maksudnya jangan suka bikin ribut *gitu*. *Kan* Ini sudah kita kawal bareng, ini program baru, memang harus banyak penyesuaian, banyak penyempurnaan, termasuk bagaimana evaluasi juga dari teman-teman PLN yang diminta untuk bisa menjadi surveyor di lapangan, yang akhirnya mengakibatkan banyak sekali data valid kami Pak itu yang tidak terserap, padahal alasannya itu sangat remeh.

Contoh pada saat survei orang yang bersangkutan tidak ada di rumah, contoh lagi, pada saat survei orang yang bersangkutan tidak mau difoto. Itu aja sudah ter-*delete* Pak, padahal secara syarat-syarat yang lain mereka ini sudah memenuhi semua *gitu* apa *nggak nyesek*.

Kami masing-masing mendapatkan kuota, betul, tapi tidak ada di antara kami ini yang bisa memenuhi 100% itu tidak ada, *even* pimpinan, boleh dicek. Bahkan yang banyak itu kita ini bisa terpenuhi 60% itu sudah bagus Pak, lah padahal pada saat kita mengumpulkan data ini kita *kan* juga sudah sosialisasi kepada beliau-beliau, bahkan setelah ini akan mendapatkan sesuatu semacam itu.

Coba bayangkan bagaimana kami ini harus menjelaskan Pak kepada calon penerima manfaat yang jumlahnya ribuan, tolong juga dipahami kondisi kebatinan kami, belum lagi itu *kan* menjelang pemilihan ya Pak ya. Sehingga banyak sekali ekspektasi masyarakat yang ditunjukkan kepada kami begitu loh, sehingga evaluasilah ke depan *gitu*. Apakah memang survei di lapangan ini yang harus diganti sistemnya, diganti personilnya ataukah bagaimana begitu, kalau memang program ini ke depan akan diadakan lagi karena sepertinya tahun 2024 itu *nggak* ada ya Pak, AML tidak ada Pak, iya.

*Nah* berikutnya PJUTS, PJUTS ini memang harus kita akui bersama setiap tahun selalu ada permasalahan, entah itu pemasangannya yang kurang tepat waktu, entah itu kualitas dari barangnya yang memang belum baik dan lain sebagainya. Tapi di luar itu Pak, manfaatnya itu sangat luar biasa untuk masyarakat. Bahkan kadang-kadang kalau misalnya lampu PLN mati, dia nyala sendiri, lalu mereka foto kirim ke kami itu kayak bisa menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kami *gitu*.

Kita bisa memberi manfaat secara langsung kepada mereka. Bahkan senior Pak Ramson bilang makam aja juga dikasih lampu PJUTS *gitu* karena memang kalau di daerah Pak kadang-kadang ada kepercayaan kalau semakin cepat dikebumikan itu semakin baik, tidak peduli siang, malam, tengah malam, dini hari *kan* semacam itu. Jadi itu sangat membantu sekali *gitu* loh, belum lagi di daerah-daerah 3 T Pak, yang memang belum ada jaringannya. *Nah* itu *kan* berarti PJUTS ini merupakan produk yang paling dibutuhkan sebenarnya di Kementerian ESDM khususnya di Dirjen EBTKE.

*Nah* masalah 2024 belum ada ini kita kemarin sudah sepakat ya Pak Menteri, kita sudah sepakat kalau misalnya ada perubahan anggaran PJUTS ini akan kita upayakan begitu *kan* Pak perjanjiannya. Tapi untuk yang 2023 ini saya selain memikirkan nasib kita semuanya yang di bilang PHP sama konstituen karena pondasinya tuh udah ada, tapi belum dipasang-pasang saya juga mikir kok kontraktornya ini berani sekali ya *gitu* loh.

Kalau ada yang menyampaikan mereka lagi kesulitan keuangan kok ya ikut lelang, lah ini panitia lelangnya ini harus bertanggung jawab juga dong, jangan hanya sekedar memastikan bagaimana ada pemenang dan bagaimana program ini terlaksana, tapi kalau udah ada model-model kayak gini masa ya mau diulangi lagi *gitu* loh. Jadi saya mohon ini juga harus di introspeksi lagi.

Yang berikutnya Pak, halaman 8 pelaksanaan subsidi untuk konversi motor listrik yang tidak sampai satu persen pencapaiannya. Lalu dilanjut di halaman 11, apakah karena memang pencapaiannya itu sangat sedikit, kurang dari satu persen makanya terus cuman dipakai 10 unit. Ini menurut saya kayak

ini guyonan apa gimana ya, harusnya kalau pemahaman kami dan kami sudah sampaikan pada saat penyusunan anggaran ini, kalau misalnya program itu tidak bisa dilaksanakan ya udah hapus aja *gitu* loh, ngapain kok dipaksakan. Kalau misalnya di sini tertulis 0,1M Pak, sedangkan ini konversinya cuman 10 unit, estimasi saya 1 unit mendapatkan 10 juta kurang lebih, itu udah bisa beli motor baru Pak, ngapain dikonversi *gitu* loh.

Jadi mohon ini juga menjadi evaluasi dan yang terakhir, yang terakhir Pak masih dari halaman 8 dan halaman 11. Ini saya cuman menyandingkan saja Pak Menteri, ada mitigasi kebencanaan geologi. Kami sepakat karena ternyata mitigasi bencana yang ada di Indonesia ini sangat amat rendah sekali, kita itu baru bingung kalau sudah kejadian.

Jadi program ini secara prinsip saya sangat mendukung Pak, cuman tolonglah kami ini juga dikasih tahu bentuk dari program ini kayak apa *gitu*, mitigasi kebencanaan geologi 12 kegiatan nilainya 158,76 miliar, halaman 8. Ternyata di 2024 muncul lagi halaman 11, 13 kegiatan lah nilainya menjadi 191,62 miliar naiknya banyak banget ya Pak.

Maksudnya ini kalau dibandingkan dengan 2023 itu cuma nambah satu kegiatan *gitu*, tapi nominalnya hampir 40 miliar nambahnya. Coba kami ini dijelaskan maksudnya memang ada perubahan bentuk dari yang sebelumnya atau bagaimana? Sehingga kami ini juga bisa memahami *gitu* bahwa ini memang betul-betul diperlukan dan nantinya juga akan dimanfaatkan untuk masyarakat begitu.

Mungkin itu Pimpinan yang bisa kami sampaikan, oh ya satu lagi Pak terkait listrik desa. Kami juga sangat mendukung apa yang tadi disampaikan oleh senior kami Pak Mukhtarudin, memang betul Pak saya saksinya beliau dan Bu Mercy itu yang sudah berjuang habis-habisan di Badan Anggaran supaya listrik desa ini bisa mendapatkan perhatian khusus begitu, saya ini cuman supporter ya Pak. Mudah-mudahan di tahun 2024 itu bisa benar-benar terlaksana karena sesungguhnya ini adalah kewajiban dari negara lah untuk bisa menghadirkan keadilan dan keandalan energi di seluruh Indonesia, utamanya di daerah 3 T begitu.

Terima kasih Pak Menteri atas kerjasamanya yang baik, mudah-mudahan ke depan kita juga tetap bisa menjaga supaya program-program yang bermanfaat untuk masyarakat ini bisa kita kawal dan kita tambah *gitu* ya Pak Menteri.

Terima kasih.

Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan kami akhiri.

*Wallahul muwafiq ila aqwamitthoriq,  
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*



**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

**F-PKB (H. MARWAN JA'FAR):**

Tambahi sedikit bisa Pak.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Ya silakan.

**F-PKB (H. MARWAN JA'FAR):**

Pak Menteri, saya agak tergelitik beberapa hal Pimpinan dan mitra kerja kita Pak Menteri ESDM dan seluruh jajaran. Yang pertama adalah mengenai soal kewenangan pencabutan IUP, ini ESDM tapi mintanya juga ke Kementerian Investasi dan BKPM. Saya kira ini belum *clear* untuk koordinasi lintas kementerian dan oleh karena itu saya berharap Kementerian ESDM ini jangan kalah terus dalam konteks untuk memperjuangkan kewenangannya, otoritasnya. *Nah* ini saya nanti butuh penjelasan soal bagaimana ini bisa terjadi yang seharusnya ini adalah domain dari Kementerian ESDM, itu yang pertama.

Yang kedua adalah sama juga soal KKP soal pasir laut, pasir laut ini KKP yang akhirnya sebagai *leading sector* dan Kementerian ESDM lagi-lagi di sini kalah dalam konteks untuk membangun narasi argumentasi dan sekaligus kewenangannya dipreteli. Kami Pak sebagai mitra kerja Bapak itu sebetulnya sangat malu Pak dengan tidak sebegitu *fighter*-nya Kementerian ESDM ini, tidak sebegitu *fighting*-nya Kementerian ESDM ini.

Saya lihat Pak Menteri ini orangnya halus, kalem, sabar tapi menghanyutkan Pak. Iya KKP-nya ade kelas, masa kalah sama ade kelas, halus, menghanyutkan ya tapi ya kadang-kadang primordialistiknya muncul *gitu kan*, kadang-kadang sektarianismenya muncul dan seterusnya itu, meskipun kelihatannya halus *gitu*, itu *kan* tipu-tipu juga itu.

Saya kira juga sama seperti yang dilakukan oleh SKK Migas, SKK Migas ini juga sama menghanyutkan juga halus dan seterusnya tetapi kondisinya juga sama seperti itu. Saya kira komunikasi politik dan komunikasi sosialnya antara Kementerian ESDM dan di bawahnya juga ada SKK Migas ini juga sangat parah. Menteri Pak, seorang menteri itu pejabat publik, komunikasi sosialnya harus baik, komunikasi politiknya harus baik karena menghadapi seluruh Anggota DPR di Komisi VII, jangan asosial seperti ini.

Maksud saya adalah bahwa saya mengatakan agak sedikit-sedikit keras ini dalam rangka kata saya adalah *amar ma'ruf nahi munkar* ini saya, sekarang karena bulan puasa. *Nah* oleh karena itu apa yang disebutkan oleh teman-teman tadi saya kira benar yang soal-soal teknis tadi itu, saya bicara soal

kewenangan, perbaikilah komunikasi politik, perbaikilah komunikasi sosial dan seterusnya dan ini saya kira menjadi penting karena situasi dan kondisi sekarang ini menuntut keadaan seperti itu.

Kemudian yang ketiga Bapak-Ibu sekalian, Kementerian ESDM ini adalah kementerian yang sangat strategis sebetulnya tapi tadi dibahas oleh teman-teman banyak sekali kekurangannya dan saya kira manajemen di dalam ini sangat amburadul. Saya berharap bahwa komunikasi ini sekali lagi bahwa penataan manajemen di dalam, meskipun ini periodenya juga mau selesai, 8 bulan lagi *kan* selesai ini.

Ini manajemen di dalam dan koordinasi di dalam termasuk metokrasi yang ada di dalam ini benar-benar diperhatikan secara serius, jangan lalu mentang-mentang eksekutif memegang seluruh *policy* anggaran dan seterusnya, lalu Anggota DPR yang berjibaku, habis berjibaku kita ini menghadapi Pemilu lalu perlakuan dari pihak-pihak kementerian ini menjadi tidak baik. Saya kira itu harus, harus dan harus dihentikan.

Demikian Pak Ketua yang saya sampaikan, terima kasih.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Marwan Jafar.

Lanjut Pak Sartono dari Fraksi Partai Demokrat.

**F-DEMOKRAT (SARTONO HUTOMO):**

Terima kasih Pimpinan, Pak Eddy maraton memimpin rapat walaupun puasa, luar biasa.

Para sahabat Komisi VII yang kami hormati, puasa-puasa pun keras tapi juga langsung *stric to the point* berikan suatu *input* masukan. Pak Menteri yang kami hormati dan seluruh jajarannya, Dirjen, Sekjen, Kepala BPH Migas, SKK Migas yang kami hormati.

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Menyikapi masukan dari teman-teman tadi kami juga usul begitu tentang PJUTS, ini dari tahun ke tahun terjadi permasalahan juga, pascanya juga, pasca pemasangannya juga bermasalah juga itu Pak Menteri. *Nah* nanti kalau apa saya melihat bisa *ndak* kalau di program apa itu anggaran di tahun 2024 itu di-*switch*, ini *kan* banyak masalah-masalah ini di *switch* ke apa listrik, apa itu BPBL (Bantuan Pasang Baru Listrik).

*Nah* ini yang lebih maksimal ini kalau saya lihat di lapangan dibanding BPJS, respon masyarakat juga luar biasa, tidak ada permasalahan-permasalahan yang berarti lah di lapangan. *Nah* ini kalau memungkinkan periode akhir ini bisa di-switch ke situ Pimpinan, itu kesatu.

Kedua, kita juga harus berikan apresiasi tentang realisasi target PNPB 3.003 triliun, 116% dari target. Ini di saat situasi yang juga dinamis bisa mencapai target, tapi juga perlu saya ingatkan juga menjadi catatan Pak Menteri, mungkin potensi apa kerugian dari ilegal ini juga harus menjadi *concern* (*suara tidak jelas rekaman terputus 1.05.05-1.05.11*) potensi ilegal apa tambang-tambang ilegal ini, itu kedua.

Berikutnya tentang ini Pak Menteri, revisi PP RI Nomor 191 Tahun 2014 ini banyak pertanyaan dari media, dari masyarakat juga, saya menyampaikan bahwa saya bersepakat ya memang harus ada revisi dan juga apa itu pembatasan Pertalite ini merupakan dari program subsidi tepat sasaran.

*Nah* ini *kan* selama ini mungkin banyak juga kebocoran-kebocoran, tidak tepat sasaran, ini perlu pendataan yang apa lebih detail begitu ya diimbangi dengan data yang konkret dan juga penerapan di lapangan. Yang terjadi ini *kan* implementasi di lapangan kita ini, bisa-bisa kebocorannya lebih tinggi dibanding untuk yang disubsidikan kepada masyarakat.

*Nah* ini perlu kesiapan regulasi yang matang betul, juga apa tentu pasti terjadi imbas ya mungkin ya di lapangan ya, apa perlu penyesuaian-penyesuaian lah ini kalau terjadi di lapangan. Juga dalam hal ini pemerintah, Kementerian ESDM dan Pertamina tentunya tentu harus menjaga pasokan stok, supaya harga itu bisa apa stabil lah kurang lebih begitu dan juga perlu juga ada batasan kendaraan apa saja, CC-nya bagaimana, juga kategorisasinya juga bagaimana, mungkin juga ada prioritas untuk memberikan subsidi bagi kendaraan yang mengangkut bahan pokok makanan misalnya ya. Ini juga apa menjadi *concern* juga supaya kalau terjadi inflasi misalnya kita juga apa bisa terkontrol lah kurang begitu.

Begitu Pimpinan, terima kasih.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Sartono.

Lanjut Fraksi PKS, silakan Pak Mul.

**F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):**

Terima kasih Pimpinan.

Atas izin Ketua Poksi, teman-teman yang budiman, Pak Menteri serta jajarannya, Kepala BPH Migas, Kepala SKK Migas.

Saya tidak banyak hanya satu saja pertanyaan karena di awal rapat ini saya interupsi menanyakan kepada Pimpinan, kenapa seharusnya *kan* jadwal kita hari ini pembahasan IUP itu bersama dengan Menteri Investasi. Ternyata karena persoalan administrasi kita tidak berhasil menyelenggarakan rapat bersama.

Saya ingin mendalami yang ada di halaman 17, di situ Pak Menteri menulis agar menjadi perhatian nomor 2, pencabutan terhadap IUP dalam daftar pencabutan IUP melalui SK yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM. Apabila terdapat perbedaan jumlah dalam data pencabutan IUP, antara Dirjen Minerba dengan BKPM dimungkinkan adanya pencabutan IUP oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM, yang tidak atau belum dikirimkan tembusannya ke Dirjen Minerba.

Kalau kita membaca satu halaman ini sangat jelas bahwa kewenangan pencabutan sepertinya ada di tangan Menteri Investasi/BKPM. Saya masih ingat ketika membahas Undang-Undang Minerba di ruang ini, yang kebetulan paralel dengan Undang-Undang Cipta Kerja terkait perizinan. Tiktok kita antara di sini dan di sana, akhirnya pembahasan Undang-Undang Minerba *stop* dulu nunggu selesai pembahasan Omnibus law.

Di sana terkait izin yang diserahkan kepada pemerintah pusat adalah perizinan berusaha, akibatnya redaksi di Undang-undang Minerba kita sebut izin yakni apakah itu IUP atau IUPK. Lalu di bawahnya standar, sertifikat, teknis lainnya berada asumsi kita adalah di Kementerian ESDM. Walaupun *nggak* tegas, tegas di dalam undang-undang itu ditegaskan seperti di kalimatnya, tetapi terkait pencabutan sangat jelas di dalam pasal di sini Pak Menteri juga menyebut di Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2029 tentang Pertambangan Minerba disebutkan "IUP atau IUPK dapat dicabut oleh menteri jika pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban bla, bla, bla".

Artinya menteri berkewenangan untuk mencabut, pertanyaannya menteri apakah itu? Tadi kawan-kawan kita sudah menanyakan. Menteri dalam Undang-Undang Minerba adalah menteri yang terkait dengan pertambangan dan mineral batubara, bukan menteri Investasi. Maka ini secara kasat mata menurut pandangan saya, membentuk undang-undang, kami adalah pembentuk undang-undang, kasat mata ini terjadi mal administrasi tata kelalo *bad governance*, pemerintah yang tidak baik dalam menempatkan aktor pelaku undang-undang ini.

Jadi saya merasa ini bukannya Pak Menteri yang, yang kalah dalam berebut kewenangan, ini Pak Menteri juga soalnya. Jadi memang pemerintah secara keseluruhan lebih menginginkan seperti itu terjadi adalah *bad governance*. Akibatnya tidak heran kalau sudah *governance*-nya jelek maka terjadi turunannya yang semakin amburadul yang dijelaskan oleh Tempo dan





sebagainya. Karenanya kita minta bisakah kita mendatangkan Menteri Investasi di sini, kita ingin tanya bagaimana ini sebenarnya tapi *kan* kita sudah mendengar semua bahwa itu tidak memungkinkan.

Akibatnya apa? Kita dalam menjalankan fungsi pengawasan menjadi bingung ketika ditanyakan oleh mitra-mitra kita para pengusaha yang dibatalkan IUP-nya ya *kan*, kita bingung mau jawab apa ini ya, dibilang bukan kemenangan kita ya susah ya *kan* kewenangan kita. Namun kita tetap panggil Menteri Investasi bukan wilayah kita, ini *kan* jadi repot urusannya.

Jadi rumpun eksekutif yang mal administrasi akhirnya terbawa ke rumpun legislatif, *nggak* nyambung ini jadinya. *Nah* itulah permasalahannya, mungkin tampak kecil tapi secara bernegara saya rasa ini hal yang besar. Kalau kita mau menjadi negara kuat, kita harus tata *governance* ini, semakin hari semakin kokoh.

Saya rasa itu Pak Menteri, saya mengalamatkan ini semua bukan hanya kepada Pak Menteri tapi kepada pemerintahan secara umum ya agar betul-betul bisa memperbaiki tata kelola yang baik.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

Bu Diah.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Bu Diah. Silakan Bu Diah.

**F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Komisi VII, Pak Menteri beserta seluruh jajarannya.

Kita bersyukur atas berbagai capaian yang telah diraih ya oleh Kementerian ESDM, khususnya tadi terkait kenaikan PNBPN dan seterusnya tapi tentunya evaluasi juga menjadi sesuatu yang wajib kita laksanakan untuk kebaikan kita di masa yang akan datang. Saya *nggak* bosan Pak, untuk pertama ini mengkritisi soal Jargas *nih* *nggak* naik-naik *gitu* ya cuma 60.000, sekitar 60.000 saluran rumah tangga dari target 950.000, *kan* ini benar-benar sangat-sangat jauh *gitu* ya.

Artinya dan ini ada beberapa nanti yang lain juga termasuk Pak yang perlu kita renungkan, termasuk tadi saya juga sama ingin menggarisbawahi soal program konversi motor listrik. Targetnya 50.000 tercapainya 495 unit, jadi kalau target itu tidak tercapai ada tingkat kewajaran tapi kalau tidak tercapainya



jauh banget *gitu* berarti ini ada ketidakseriusan atau memang hambatannya segede gunung banget *gitu* ya sampai tidak, apa tingkat realisasinya *nggak* sampai 1%. Terkait motor listrik *kan* juga sama di Kementerian Perindustrian juga begitu capaiannya juga rendah, sangat rendah di bawah 10% *gitu*.

Jadi menurut saya ini harus ada evaluasi yang sungguh-sungguh *gitu* ya, Jargas kita tahu kepentingannya dan ini bisa di kemudian hari semakin menurunkan impor LPG kita *gitu* ya. Seserius apa pemerintah ini berusaha untuk memperluas infrastruktur untuk jaringan gas rumah tangga terutama, *nah* ini saya berharap ada, ada apa ya, ada perhatian yang sungguh-sungguh ke depan karena ini realisasinya benar-benar rendah *gitu* Pak ya untuk Jargas dan tadi juga yang apa namanya konversi motor listrik itu.

Sehingga sampai menyisakan anggaran 349,75 miliar yang tidak terserap, itu *kan* *nggak* serupiah dua rupiah itu, sangat besar, *kan* sayang *gitu* ya. Dari sisi perencanaan terus kemudian kita mengalokasikan anggaran sedemikian besar, tapi *nggak*, *nggak* terserap *gitu*, tidak bisa direalisasikan, sisa anggarannya 349 miliar lebih ini.

Jadi ya saya sepakat seperti disampaikan dengan Bu Ratna tadi, ini perencanaannya *gitu* yang tidak pas *gitu* ya atau pelaksanaannya kurang serius, atau apa *gitu* ya dan bahkan saya juga melihatnya ketika tahun 2024 dianggarkan untuk 10 motor ini tuh levelnya Kementerian Pak, bukan level kecamatan *gitu* pengadaan urusan 10 motor *gitu* ya. Kalau di tingkat desa 10 motor *gitu* target *gitu*, ini levelnya kementerian secara nasional target 10 motor.

Jadi ya benar-benar main-main ini Pak *gitu*, saya ngelihatnya *nggak* ada keseriusan *gitu*. Jadi kalau memang dianggap gagal ya sudah direvisi lagi programnya, dipersiapkan lagi dengan baik, tidak usah ngotot dengan judul program itu atau apa caranya *gitu* ada bentuk yang lain yang kita coba.

Maksudnya baik, saya paham dengan apa namanya pengurangan emisi lah, kemudian dengan energi terbarukan dan sebagainya tapi *how to*-nya kita *nggak* bisa paksakan kalau memang cara ini *nggak* berhasil. Jadi 10 program konversi 10 unit motor untuk tingkat nasional itu benar-benar *nggak* pantas Pak *gitu* ya.

Jadi menurut saya harus ada hal yang serius ini diperhatikan di Kementerian ESDM ke depan *gitu* ya karena masyarakat tentu berharap banyak sama Kementerian ESDM ini dan Komisi VII selama ini kita berusaha untuk terus men-*support*, bahkan ya kami di Badan Anggaran juga berusaha *gitu* ya untuk anggaran-anggaran kepada Kementerian ESDM ini bisa ditingkatkan ya tapi sekali lagi kami juga berharap bahwa program-program yang memang digulirkan di ESDM ini betul-betul program yang terencana dengan baik, terjaga eksekusinya sehingga tujuannya juga bisa kita raih.

Terima kasih Pimpinan.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Sebelum saya ke itu ke Bu Andi ke Fraksi PAN, tadi terlewatkan Pak Hendrik dari Demokrat.

Silakan Pak.

**F-DEMOKRAT (Drs. HENDRIK SITOMPUL, M.M.):**

Baik, terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Rekan-rekan Komisi VII yang saya hormati, Pak Menteri beserta jajaran, ada jajaran SKK yang saya hormati.

Saya fokus kepada di halaman 6 Pak Menteri, dengan judulnya *good news gitu* ya. Ini keren banget nih *good news*, tapi *good news* ini juga saya berpikir untuk program ke depan kalau bisa anak-anak kita ke depan bisa makan siang gratis dengan PNBPN ini. Kita menggali kalau pajak udah selesai lah itu, saya lebih fokus untuk PNBPN ini karena minerba ini menurut saya sangat seksi terkait PNBPN-nya.

Kita mulai dengan blok Pak Menteri, kalau kita lihat blok apa ini pendapatan PNBPN ini dari 2017 sampai 2024 kita lihat titik yang perubahan itu ada di 2021 terkait antara migas dengan minerba *gitu* ya Pak Menteri, kita melihat tapi setelah 2022 ini yang top ini apa minerba *gitu loh*, minerba terus minerba.

Saya mau tanya kenapa migasnya turun, kenapa migasnya turun? Terus minerbanya begitu apa ya signifikan banget ini naiknya *gitu loh*. Sedangkan migasnya kok cenderung turun ini kenapa? Kemarin kita sudah RDP dengan SKK ya *gitu* Pak Cip, ya kelihatannya memang sumur-sumur kita tidak maksimal *gitu loh*, hingga akhirnya PNBPN kita itu turun.

*Nah* kita harus sangat berharap Pak Menteri, supaya K3S ini didorong lagi Pak ya supaya PNBPN kita naik ini. Kalau *lifting* kita turun ya artinya PNBPN-turun. Kalau menurut saya ini semua K3S dikasih target aja PNBPN-nya, dikasih *flat gitu* karena kalau dia turun *nggak* ada pertanggungjawaban juga nih targetnya PNBPN-nya berapa *gitu loh*. Ya udah setiap K3S A, B, C dan ini *flat* di beberapa PNBPN-nya. Kalau terus kita biarkan demikian, *lifting* turun ya pasti PNBPN turun terus Pak.

Jadi kita juga berharap Pak Cip juga harus tegas, ini setiap K3S PNBPN-nya setiap tahun demikian dengan rumusan-rumusan yang ada. Itu juga dan sama juga dengan minerba, ketika mau mengajukan RKAB dibuat target PNBPN-nya Pak supaya jelas. Jadi pendapatan kita bisa meningkat PNBPN, jadi makan siang dan susunya bisa tercapai nanti kita. Jadi kita sangat berharap

Pak, saya mau tahu nih kenapa nih migas ini turun, *hipotesa* saya tadi, kemarin dengan SKK Migas mungkin karena *lifting* turun *gitu* atau yang lainnya.

Ada juga *case* Pak, terkait di retail di apa ya di hilir itu bisnis industri, BBM industri itu juga carut-marut Pak karena *nggak* diawasi. Kita heran nih banyak ilu yang ada di Indonesia ini, kalau kita cek ada *nggak* mereka impor? *Nggak* ada, yang impor itu hanya Pertamina Patra Niaga tapi ketika mereka bisa berdagang industri cukup leluasa memberikan diskon-diskon yang kadang-kadang kita bingung nih, ini minyak dari mana *gitu* loh.

Ini kita butuhkan pengawasan dari Migas, supaya apalagi? Supaya pendapatan PNBP kita lebih meningkat Pak. Itu masih banyak saya lihat ilu-ilu itu melakukan transaksi tanpa apa namanya tanpa pajak Pak. Mereka memberikan diskon tinggi dengan catatan pajaknya tidak dipungut *gitu* loh, *nah* ini kemarin juga saya mana Pak, yang migas mana migas yang saya tanya kemarin, sampai sekarang datanya *nggak* ada tuh, mana Pak apa namanya Pak Harahap mana? *Nggak* ada.

Saya minta sampai hari ini *nggak* ada datanya Pak karena ada *case* ilu ini dia menjual ke BUMN dengan diskon yang tinggi mengalahkan Pertamina Pak. Padahal dia bukan importir, dia bukan importir dan sekarang biayanya dari mana. Dia bisa mengalahkan diskon dengan Pertamina ini *kan* aneh *gitu* loh. Artinya ada hal-hal yang dipangkas untuk memberikan diskon kepada *end user*.

Ini saya kira juga bisa dikaji ulang lebih dalam lagi transaksi yang dilakukan ilu terkait dengan minyak-minyak industri Pak. Saya kemarin sudah minta tapi sampai sekarang datanya *nggak* ada Pak, saya *nggak* tahu karena ada temuan saya di Banten kemarin. Ada temuan saya di Banten, ilu di sana menjual ke BUMN kita *nggak* tahu minyak dari mana, rupanya transaksi dari mana-mana, padahal sumber minyaknya itu juga dari Pertamina juga. Kembali lagi ada PNBP yang hilang di sana Pak, dalam transaksi itu.

Jadi menurut saya jumlah dari PNBP dari migas sama minerba harusnya sama dong, *nggak* boleh apa, padahal gimana Pak? Migas ini kebutuhan kita sehari-hari loh Pak masyarakat Indonesia. Sedangkan Minerba itu *kan* terkhusus dia, migas ini kebutuhan setiap hari *day to-day* masyarakat Indonesia, harusnya PNBP-nya lebih tinggi daripada minerba.

Ini yang maksud saya tolong dikaji di ESDM mana ini posisinya nih sebenarnya, kalau menurut saya pendapat saya semestinya PNBP Migas lebih tinggi daripada minerba, kenapa? Karena pengawasan yang ada terjadi di lapangan ini tidak diawasi dengan ketat, tidak dilihat benar karena permainan-permainan apa perdagangan minyak di bawah ini tidak diawasi ya.

Yang anehnya tuh yang pasti impor itu *kan* terbatas kalau dicari, tapi bisa para pedagang ini pada agen-agen ini melakukan transaksi di luar dari kewajiban, bisa mengalahkan Pertamina, ini sangat aneh. Jadi saya kira perlu penelitian ini Pak.



Jadi saya minta kemarin datanya belum sampai sekarang belum ada nih Pak Menteri, saya butuh itu supaya saya paparkan nanti begini loh permainan-permainannya. Mungkin karena kita banyak mempelajari di situ jadi bisa saya memberi kasih edukasi, gimana titik-titik apa ini pengusaha ini bermain-main dalam perdagangan minyak ini *gitu* loh.

Saya kira begitu Pak Menteri, jadi saya berharap juga tadi rekomendasi saya pada saat RKAB semua para RKAB itu dikasih target PNBPN-nya. Sama juga K3S dikasih target PNBPN-nya berapa supaya pendapatan negara bisa meningkat. Kita pajak sudah selesai lah, kita tingkatkan pajak nanti masyarakat juga repotkan naikkan pajak susah juga kita semua. *Nah* saya kira dari minerba inilah saya kira kita bisa gali lagi potensi PNBPN kita.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Terima kasih Pak Hendrik.

Lanjut Ibu Andi silahkan.

**F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):**

*Bismillahirrohmanirrohim,  
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Yang saya hormati Pak Menteri bersama seluruh ada Pak Sekjen dan seluruh Dirjen,

Yang saya hormati Pimpinan Rapat dan seluruh Anggota Komisi VII.

Pertama, Pak Menteri saya ingin mengingatkan bunyi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Anggota DPR di situ menyatakan atau DPR mempunyai tiga fungsi: fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi. APBN itu sebelum dilaksanakan ada legislasinya ada namanya Undang-Undang APBN, jadi ada kesepakatan tanggal 31 Agustus bahwa apa yang sudah kita sepakati 31 Agustus setelah sebelumnya ya kemudian menjadi Undang-Undang APBN 2024 ternyata, saya *nggak* tahu ya menggunakan kata apa, sebaiknya Pak tidak ada lagi anggaran selundupan yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di ruang rapat ini.

Contohnya saya membandingkan dengan 31 Agustus datanya, hasil rapat atau pemaparan 31 Agustus yang sudah akhirnya disepakati menjadi kesimpulan rapat tidak ada yang namanya modernisasi peralatan mitigasi bencana pelayanan museum dan survei geologi sebanyak 100 miliar.

Artinya Pimpinan dan teman-teman buat apa kita rapat, kemudian tiba-tiba ada anggaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan rapat, besar lagi anggarannya 100,88 miliar ya. Saya membandingkan misalnya contohnya mitigasi kebencanaan geologi dari 184,30M menjadi 191M, kemudian



pemantauan air tanah dari 39,90M menjadi 40,20M ini, ini *kan* ada angka-angka yang sebelumnya sudah kita sepakati.

Coba silakan Pak Menteri buka hasil rapat pemaparan Bapak dan kita sepakati di 31 Agustus. Ini penting supaya kita melaksanakan fungsi pengawasan seperti yang dikatakan oleh Pak Marwan Jafar, beliau juga pernah jadi menteri ya, Pak Marwan Jafar, kita maksudnya berdasarkan apa yang menjadi kesepakatan, komitmen kita, saya kaitkan dengan tiga fungsi DPR sesuai dengan Undang-Undang Dasar bahwa kita melakukan pengawasan terhadap angka-angka ini Pak, jangan tiba-tiba tidak kita sepakati ada di sini.

Kemudian itu, kemudian saya sebenarnya ingin mendapatkan secara tertulis apa sih hasil dari pemantauan air tanah yang setiap tahun dianggarkan ya, setiap tahun dengan nilai yang cukup fantastis sekitar 40 miliar setiap tahun. Saya minta tertulis itu menjadi kesimpulan rapat Pak Pimpinan, tertulis apa yang dihasilkan.

Apalagi judulnya sebagian anggaran digunakan untuk pembangunan infrastruktur bagi masyarakat, ya masyarakat sih ngertinya bahwa dia BPBL, Konkit nelayan, Konkit petani, Jargas, apalagi yang disampaikan oleh Pak, oleh Bu Diah tadi, Jargas kita masih sedikit sekali. Jadi komitmen pemerintah untuk berapa juta Jargas ini ternyata tahun 2024 *nggak* ada Jargas.

Jadi artinya apa yang sudah disepakati paada komitmen-komitmen itu tidak kelihatan di dalam *budgeting*. Kenapa kita harus apa namanya dengan 100 miliar ini yang tadinya tidak ada, kemudian menjadi ada dan kemudian waktu itu juga salah satu kesimpulan rapat anggaran ada udah permintaan untuk tambahan Jargas itu juga tidak ada ya.

Kemudian Pak terkait dengan pemantauan angka anggaran, untuk Magic Com tadi Bu Ratna Juwita mengatakan per Magic Com itu 500.000 ya Bu ya, ternyata yang diturunkan itu yang 245.000 karena saya pantau langsung ke tokonya, saya fotoin itu Pak Direktur dari Gatriknya, nih, nih yang anda bagikan di toko ini cuman 265.000 nih, sisanya 245.000 ke mana nih ya.

Itu uang loh Pak, itu bagian dari pengawasan itu ya bayangkan kalau 500.000 Magic Com dikali 250.000 itu ke mana *gitu*. Pasti alasannya sudah tahu, oh kita *nggak* bisa menyediakan dalam sesuai dengan spek yang 500.000 itu katanya seperti itu, tapi ini penting loh itu ada uang di situ, yang tadinya 500.000. Ini Pak Inspektorat, Pak Irjen nih gunakan lah Pak ininya, laporannya seperti apa *gitu* ya, jadi ini penting sekali ya.

Kemudian PJUTS Pak, saya mau nanya *nih* tadi semua teman-teman ini kan anggarannya sudah, kita ini sudah pindah ke tahun anggaran 2024 tapi PJUTS dari semua Anggota ini *nggak* terealisasi. Sampai saya ini setiap ke dapil selama kampanye itu paling-paling hanya dikasih lihat lubang-lubang aja, nih Bu nih kami udah gali nih udah mau tertutup lagi, nih Bu kita udah gali. Kabupaten lain, Bu ini kami sudah gali nih Bu, mana PJUTS-nya, **masalahnya**, saya cuma, iya ini pabriknya sedang ini apa membuat tiangnya ya, kita jadi pembohong lagi.



Itulah kira-kira *gitu* lah, ya kan saya WA Pak siapa ya Pak, bukan Pak Direktur EBET. Itu Bu katanya pabriknya, jadi ya saya bohong lah sama masyarakat, sudah bawa keliling ke Kabupaten Bulukumba dilihatin, Kabupaten Bone dikasih lihat lubang, Kabupaten Maros dikasih lihat lubang, kabupaten **Wajo** dikasih lihat lubang, mana ini PJUTS-nya *gitu* loh ya. *Alhamdulillah* ya masyarakat ya kita juga dibohongin, ya kita bohongin lagi *gitu* loh.

Kira-kira ini penting Pak, uangnya ada di mana *gitu* loh kan ini sudah loncat tahun anggaran 2024 berarti kan ada anggaran yang tidak terpakai. Itu uangnya ada di mana, ini prinsip-prinsip *good governance*-nya seperti apa nih ada di Kementerian ESDM.

Ini penting Pak, jadi maksud saya ini juga penting mungkin buat Bapak-Ibu dari Anggota Komisi VII. Mungkin lain kali terutama yang nanti lanjut, kita harus hati-hati terhadap pemerintah ketika kita lihat anggarannya segini, sekarang tiba-tiba ada yang 100M yang tidak ada dalam kesepakatan kita *gitu* loh. Terus judulnya cantik sekali digunakan untuk pembangunan infrastruktur bagi masyarakat, ya memang untuk masyarakat tapi maksud saya terus kemudian ada kenaikan-kenaikan walaupun 200 juta, 300 juta.

Kemudian ketiga Pak, saya setuju dengan Bu Diah ini lucu-lucu amat 10 unit, ini kayak proyek-proyekan aja konversi motor listrik. Motornya siapa yang 10 unit ini *gitu* loh, mendingan *nggak* usah lah Pak, uangnya dipakai yang lain aja. Entah untuk Jargas, untuk BPBL ya ataupun untuk konkrit seperti itu.

Ini mungkin catatan dari saya, tolong kembali mungkin teman-teman tapi lebih tadi sudah disampaikan dengan tegas dan keras oleh Pak Menteri Marwan Jafar. *Nah* saya juga sekaligus kembali lagi lah ke Undang-Undang Dasar 3 fungsi DPR, *budgeting*. Kalau sekarang DPR-nya baik-baik Pak, waktu saya jadi Anggota DPR 2004-2009 kalau anggarannya *nggak* sesuai, kita suruh pulang Pak, suruh pulang kementeriannya atau badannya, sekarang agak baik-baiklah.

Demikian.

*Wabillahittaufig wal hidayah,  
Wassalammu'alaikum warahmatyllahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Ada lagi tambahan dari Ibu-Bapak sekalian, Pak Willy silakan Pak.

**F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):**

Kita tadi sudah membahas tentang pengawasan proses pencabutan, pencabut hidup ya IUP Pimpinan dan DPR *kan* punya fungsi pengawasan. Saya pikir ya kalau memang kita sepakati kesimpulan rapat ini ya tentang pencabutan itu kita masukkan bahwa dalam rangka pengawasan ya kita mendorong agar aparat negara dalam hal ini ya untuk menyelidiki apa saja penyimpangan yang sudah diatur, baik yang melalui Keppres, kemudian tentang tugas satuan tugas itu karena saya melihat ini cukup viral ya.

Di mana di Tempo yang terbit sekarang ini Pak Ketua, jadi di Tempo yang terbit saat ini, ini *kan* sangat jelas ini ya bahwa banyak hal yang berhubungan dengan tugas kita di Komisi VII yang menurut saya ini bisa menjadi acuan, jangan saja Komisi VII diam *gitu* ya karena ini sudah mencuat masalah yang seperti ini ya apa sikap dari Komisi VII yang memang mengurus dunia tambang *gitu*. Kita kalau memang ada Keppres yang mengatur tentang satuan tugas ya *nggak* apa-apa, apakah ada penyelewengan atau tidak? Karena di sini juga saya melihat ya ada banyak dugaan-dugaan *gitu* ya.

Maka oleh karena itu ya perlu Komisi VII untuk memberikan tanggapan ya atas hal yang viral saat ini. *Nah* itu masukan saya untuk ketua ya karena Pak Menteri udah mantap tadi memberikan penjelasan ya, *nggak* tahu Pak Menteri mantap atau tidak mantap, itu nanti yang membuktikannya itu ya biar aparat hukum karena memang saya melihat teriakan orang itu banyak *gitu* ya atas pencabutan ini.

Ya memang ada yang keberatan, ada yang tidak keberatan ya itu wajah-wajah saja ya, tetapi sebagai orang yang ikut mengawasi dalam fungsi kita sebagai fungsi pengawasan terhadap hal yang teknis di Kementerian ESDM ini terutama menyangkut masalah pencabutan izin usaha pertambangan beberapa waktu yang lalu, menurut saya ini perlu juga kita ikut memberikan tanggapan *gitu*, jangan sampai Komisi VII itu diam. Itu pertama untuk Pimpinan.

Kemudian saya juga ikut menyoroti tentang bagaimana buruknya Pak Menteri ya terutama kontraktor yang kita beri tugas untuk pengadaan atau menyiapkan program-program yang untuk masyarakat. Menurut saya juga mungkin dalam fungsi pengawasan ya kembali ke pimpinan juga, daripada kita terus ngomong yang tidak karuan, tidak jelas *gitu* ya mau lari ke mana, ya lebih baik kita arahkan saja kepada aparat ya untuk menyelidiki apa ini masalahnya.

Keluhan-keluhan ini kok kita cuman mengeluh aja tapi tidak ada proses hukumnya *gitu* karena jujur saja, kalau saya melihat keluhan ini juga saya keluhin *gitu* karena banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, program untuk langsung kepada masyarakat tetapi kelihatannya tidak ada yang bisa memuaskan. Bahkan tudingan masyarakat itu seolah-olah kita yang kurang bertanggung jawab terhadap program ini.

*Nah* maka dalam rangka pengawasan, fungsi pengawasan kita saya pikir Pak Ketua masukkan saja di dalam kesimpulan ini juga kita menyerahkan





kepada aparat ada dugaan ketidakberesan dalam rangka, ya artinya program-program ini diluncurkan pada masyarakat, itu yang kedua.

Yang ketiga, dari apa yang dibicarakan tentang listrik ya tadi rekan saya Pak Mukhtarudin sudah membincangkannya, menurut saya sudah sudah pas saja ya. Terutama kita melihat memang listrik desa ini ya memang satu program yang tahun ini tidak ada anggaran atau tidak ada penyertaan modal negara yang masuk ke sana dan kemarin Pak Dirjen Listrik ya kita ada FGD ya dengan Dirut PLN juga ya.

Yang kelihatannya yang perlu kita *support* Dirjen Listrik ini adalah nanti di rapat terbatas dengan Presiden ya karena tinggal didorong 12 triliun aja Pak Menteri. Tinggal didorong 12 triliun, artinya listrik desa ini selesai *gitu*, dari anggaran kita lebih dari 3.000, lebih dari 3.300-an triliun itu saya pikir kalau hanya 12 koma sekian triliun itu didorong ya saya pikir ini tuntas. Jadi kita tidak banyak lagi berbicara tentang listrik desa, terutama di kampung sama sama Pak Mukhtarudin.

Sehingga saya mendorong sekali Pak Dirjen agar ini terus dibahas di tingkat kementerian untuk dibawa dalam persidangan rapat terbatas dengan Pak Presiden agar kucurkan saja jangan ragu-ragu 12 koma sekian triliun itu untuk menuntaskan masalah listrik desa yang ada di seluruh Indonesia.

Dan yang sangat terasa Pak Menteri, yang dirasakan oleh masyarakat itu adalah bagaimana listrik yang diberikan langsung kepada masyarakat melalui program penyambungan baru dan itu sangat dibutuhkan sekali saya melihat. Maka oleh karena itu ini bisa menjadi perhatian jika ada anggaran sisa saya pikir ini bisa ditambah di BPBL ini. Kemarin artinya rumah tangganya dari 80-an ribu itu bisa ditambah lagi ratusan ribu *gitu*, kenapa? Karena percepatan untuk merasakan listrik oleh masyarakat yang tidak mampu ya atau masyarakat miskin ini ya sangat terasa sekali apabila listrik mereka nyala. Ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan termasuk juga ke kesejahteraan Pak Menteri.

*Nah* ini juga penting dan juga masukan saya kepada Pak Menteri, kita seolah-olah selalu saja yang saya bahas itu di dunia pertambangan ini tidak ada ilegal *gitu*, seolah-olah *gitu*. Padahal kalau kita mau jujur yang namanya *illegal mining* ini di republik ini sangat luar biasa, tetapi kayaknya di Komisi VII tidak ada hal yang menarik membincangkan masalah ilegal ya.

Jadi mungkin Pak Menteri atau Pak Dirjen paham maksud saya bahwa marilah kita akan coba mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang cukup besar tentang ilegal yang tentu merugikan negara ya, merugikan masyarakat yang harusnya kita bantu untuk meminimalkan supaya ini tidak berlangsung, berlanjut atau seolah-olah tidak ada yang kita peduli *gitu*. Sementara kerusakan dari kegiatan-kegiatan ilegal di *illegal mining* ini cukup besar, baik yang dirasakan oleh masyarakat maupun oleh *corporate* atau perusahaan.

Mungkin itulah masukan yang saya berikan kepada Pimpinan Komisi VII dan juga kepada Pak Menteri dan jajarannya.

Terima kasih.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Baik, terima kasih.

Pak Bambang silakan, Ibu Diah ada yang mau disampaikan lagi. Pak Bambang dulu Bu Diah, kemudian lanjut Ibu.

**F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):**

Baik, terima kasih Pimpinan.

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat sore,  
Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang kami hormati Pimpinan dan Rekan-rekan Komisi VII,  
Kemudian yang kami hormati juga Pak Bapak Menteri beserta seluruh jajaran Eselon 1 Kementerian ESDM.

Saya pikir saya hanya penguatan saja, tambahan saja ya karena banyak hal yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan. Yang pertama, mungkin saya akan nyenggol sedikit persoalan tadi yang disampaikan oleh beberapa rekan-rekan terkait dengan persoalan hal-hal yang menjadi PR ya karena pencabutan 2.078 IUP.

Jadi memang sebetulnya kami di Komisi VII ini sebetulnya sangat menyayangkan, misalnya terjadi pencabutan tersebut yang kami pikir sekonyong-konyong. Ini memang mungkin cerita lama kalau kita bongkar-bongkar, kita ulang-ulang terus bisa bosan tetapi pokoknya begini Pak Menteri, yang kami sampaikan adalah jangan lagi ke depan ada kewenangan daripada Menteri ESDM itu dimutilasi, poinnya di situ ya.

Kita melihat misalkan muncul PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Sedimentasi Laut, ini gimana ceritanya saya ngomong keras pada saat itu apa kesesatan regulasi, apa urusannya iya *kan* KKP Kementerian Kelautan itu ngurusnya itu jangan ngurusan persoalan mineral. Urusan dia itu ya sekali lagi adalah urusan makhluk hidup saja, misalkan persoalan rumput laut, misalkan dia ngurusin ikan, misalkan dia ngurusin cumi.

Itu aja nanti kalau begini ngurusin sedimentasi laut nanti minyak pun yang *drilling* di laut, itu juga dia bisa minta, kewenangannya di mereka karena gara-gara laut. Saya pikir bukan begitu, ini yang dinamakan dengan kesesatan regulasi.

Saya masih ingat jika misalkan alasannya adalah persoalan sedimentasi laut, harusnya karena ini urusannya alur laut dan sebagainya, Perhubungan *dong*. *Kan* ini makanya saya bilang ini kesesatan regulasi dan kami meminta ini jangan terulang hal-hal yang berpotensi demikian. Kami ngomong terbuka saja nih misalkan dalam beberapa diskusi FGD ya kami baru tahu setelah diinformasikan oleh Pak Plt. Dirjen.

Kami memang mendorong bahwa adanya Gakkum, bagaimana marwah daripada Dirjen Minerba dan dirjen-dirjen yang lain terkait dengan penugasan mereka di dalam menjalankan bidang-bidangnya ini dapat maksimal, dapat kemudian apa langsung kepada penindakan. Maka kami usul tempo hari itu Kementerian ESDM perlu Dirjen Gakkum, tetapi bukan kemudian apa yang menjadi penugasan pengawasan Kementerian ESDM terhadap beberapa bidang-bidangnya, apakah minerba, apakah EBTKE, apakah Gatrik, apakah kemudian migas dan sebagainya lalu tiba-tiba muncul istilahnya Gakkumdu, iya *kan*.

Gakkumdu yang kemudian yang menjadi *lead*-nya adalah Kemenkopohukam. Ini gila ini menurut saya, ini kesesatan regulasi lagi nambah jauh lagi. Jadi peran Pak Menteri beserta jajarannya dimutilasi lagi, peran-pelan dicopot, diambil, diambil, diambil, kami tidak rela.

Dalam hal ini kami sampaikan kepada Pak Menteri, Komisi VII khususnya Partai Golkar, Fraksi Partai Golkar mendesak dan memberikan dorongan moril kepada Pak Menteri jangan kemudian ikut-ikutan saja, kemudian ketika di Ratas atau di mana rapat menteri itu pelan-pelan dimutilasi oleh ide-ide yang menurut kami tidak sinergi. Jadi ujung-ujungnya pelan-pelan ini menjadi barang yang tercerai-berai. Kami ingin marwah dan kemudian juga kewenangan daripada Menteri ESDM itu tidak diambil. Jadi kita minta seperti itu.

Kemudian kami tentunya memberikan dorongan kepada Pak Dirjen Minerba, dalam hal ini Pak yang kami inginkan itu adalah Bapak punya Gakkum, *lead*-nya di Bapak ketika terkait dengan persoalan minerba. Mungkin nanti untuk di migas ya *kan* juga punya, *nah* kalau ini ingin dibuat suatu hal yang lebih terorganisir tentunya Dirjen Gakkum dan saya pikir ini *kan* pembahasan ini *kan* bukan hal yang baru bagi kita di internal Komisi VII. Ini kami sudah lama memberikan dorongan ini sejak tahun 2021 mungkin ini sudah dibicarakan atau mungkin sebelum-sebelum saya masuk Komisi VII, seperti itu.

Kemudian yang kedua kami juga memberikan dukungan moril kepada Pak Dirjen Minerba, tentunya di dalam bagaimana terkait dengan menangani begitu banyak tata niaga komoditas, antara lain pertimahan ya. Kita melihat ini nikel sudah sedemikian *crowded*, kemudian ada sedikit sentuhan-sentuhan hukum. Sekarang persoalan timah kita *nggak* tahu lagi ke depan seperti apa,

tapi yang jelas mari kita jaga sama-sama, kita tata sama-sama, sehingga kemudian bagi kami saya dapilnya Bangka Belitung, kami punya kepentingan bagaimana timah ini tetap dapat memberikan manfaat untuk masyarakat, masyarakat bisa mendapat penghidupan, negara mendapatkan pemasukan PNB, tetap juga tentu hal-hal yang lain terkait masalah lingkungan hidup dan sebagainya itu dapat terjaga.

Jadi kepada Pak Menteri ini juga kami menaruhkan harapan, sehingga kita akan akan lihat bagaimana tata niaga pertimahan yang baru nanti seperti apa, mohon dukungannya.

*Nah* lalu kemudian kepada Ibu Dirjen EBTKE yang baru. Bu, Ibu PR-nya banyak nih Bu, terkait dengan persoalan dengan Komisi VII. Yang paling melukai kami itu adalah program PJUTS, ini saya *nggak* lihat nih direktornya siapa tuh yang bagian pengadaan. *Nah* kepada Pak Irjen tolong diperiksa Pak, ini sudah *nggak* benar kenapa demikian? Ini sudah bulan Maret Pak, tetapi hasil pelelangan 2023 itu belum dipasang, mau ngomong apapun salah.

Kami bisa, kami menuntut ini diperiksa sehingga kemudian ini menjadi terbuka. Ini tentunya bagian daripada pengawasan kami karena ini kalau *nggak* berlarut-larut ini, kami juga malu karena kenapa? Program ini kita bilang ini program aspirasi kami Anggota Dewan iya kan kami ke daerah, tapi menjadi masalah ya karena barangnya *nggak* sesuai. Kami tahu ini dilelang tetapi barangnya *nggak* ada, *nah* ini jadi masalah. Pak Menteri ini juga tolong jadi perhatian Pak Menteri.

Saya pikir demikian atas waktu dan kesempatannya, *(suara tidak jelas 1.50.35)* padang ilalang, tak akan habis *(suara tidak jelas 1.50.37)* saya kira tak perpanjang.

Sekian dan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat sore,  
Salam sehat semua.

**F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):**

Ya maaf tadi ada yang terlewat satu, berkaitan dengan rasio elektrifikasi. Waktu beberapa waktu lalu juga kita sudah berdiskusi ya Pak Riswan ya Pak Dirjen. Dalam paparan Pak Menteri ini disebutkan rasio elektrifikasi kita 98,33%, dalam catatan saya itu ratio elektrifikasi versi PLN. Tapi kalau ini paparan menteri *kan* mungkin *nggak* bisa versi PLN karena kalau yang versi nasional masih dokumennya dari Dirjen Gatrik juga. Itu versi nasional itu rasio elektrifikasi 99,79, kalau versi PLN betul 98,33 tapi karena ini paparan menteri saya pikir *kan* ya Pak Menteri bukan Dirut PLN *gitu*.

Jadi data itu Pak, kita *kan* mengacu membuat perencanaan berdasarkan data tapi poinnya sebetulnya saya juga ingin menyampaikan di sini langsung

kepada Pak Menteri sebagaimana juga yang saya sampaikan kepada Pak Dirjen, apa yang dijadikan acuan untuk ratio elektrifikasi ini.

Kami pernah diberi rumus dan dimunculkan ratio elektrifikasi adalah rumah tangga berlistrik dibagi jumlah rumah tangga nasional. Yang menjadi persoalan Pak, ternyata yang masuk kategori rumah tangga berlistrik itu juga rumah-rumah yang listriknnya nyalur dari rumah tetangganya. Sementara saya *nggak* tahu apakah ini sudah legal atau belum *gitu*, kalau itu illegal tapi kenapa dijadikan acuan kalau ilegal. Secara tidak langsung kita membenarkan sesuatu yang ilegal, jadi ketika data rumah tangga berlistrik ini memasukkan yang ilegal-legal ini berarti data ratio elektrifikasi yang tinggi ini palsu Pak, aslinya *nggak* begitu karena mereka masih nyalur masih legal.

*Nah* ini saya kira perlu juga Pak *gitu* ya disepakati lagi *gitu* di rumah tangga berlistrik itu yang resmi atau memasukkan yang ilegal. Kalau memasukkan yang ilegal, berarti dilema sebetulnya buat kita, berarti kita mengakui karena menganggap prestasi juga itu rumah tangga yang sudah nyalur dari tetangganya itu karena dalam prestasi kita dalam hitungan ratio elektrifikasi.

Itu saja mungkin Pimpinan, terima kasih.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Baik, terima kasih.

**F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):**

Setengah detik Pak.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya silakan.

**F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):**

Pak Menteri, sekarang ini ada sedang dibahas Rancangan Undang-Undang Kelautan, saya salah satu anggota pansus-nya. *Nah* di situ Kementerian KKP mengajukan DIM-nya, saya *nggak* tahu apakah diajak bicara Kementerian ESDM itu tentang energi baru terbarukan oleh sebagai DIM pemerintah ke dalam rancangan undang-undang itu, termasuk sedimentasi. Ini saya terbetik apa yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, jangan sampai ini semua nanti diambil nih punyanya ESDM nih.

*Nah* coba di, karena yang menjadi, saya sebenarnya agak protes kenapa *leading* sektornya tuh KKP, padahal Undang-Undang Kelautan itu



bukan tentang perikanan. Harusnya Pak Jokowi jangan mengirim *leading* sektor untuk pembahasan itu adalah dari KKP karena isinya bukan untuk KKP sebenarnya.

Ini aja Pak, mungkin Bapak harus *crosscheck* jangan sampai nanti diambil lagi semuanya, sedimentasi, EBT dan lain-lain.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Baik, terima kasih Ibu-Bapak.

Kalau tidak ada yang bertanya lagi saya izin untuk mengajukan pertanyaan kepada Pak Menteri, singkat saja Pak. Tadi sudah disebutkan oleh rekan-rekan Anggota Komisi VII dan saya kira titik tekannya pada hari ini adalah kepada pencabutan izin Pak. Pencabutan izin ini yang menurut kami sesungguhnya itu justru tidak sesuai dengan perangkat hukum yang sudah kita putuskan yaitu di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 119 itu sudah jelas bahwa yang berhak mencabut izin itu adalah Menteri.

*Nah* tetapi kemudian aturan turunannya justru aturan turunannya itu kemudian mencabut kewenangan Menteri ESDM dalam hal ini. Jadi saya kira itu butuh perhatian khusus karena aturan turunan itu bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya, itu yang pertama Pak.

Kedua Pak, kami ingin juga bertanya kepada Bapak tentang revisi PP 96 Tahun 2021. Beberapa hal yang itu menyangkut pemberian izin untuk usaha untuk Ormas, kemudian pemberian izin usaha yang lebih lama dari 5 tahun dan kemudian juga terkait masalah larangan ekspor yang akan berlaku kembali tanggal 1 Juni 2024 terhadap mineral tembaga. *Nah* ini juga saya kira perlu penjelasan dari Pak Menteri.

Berikut juga mengenai Perpres 1 Pak, Perpres 1 tahun 2000, maaf Perpres 101/2014 yang akan di, yang tengah direvisi saat ini. Yang mana kemudian revisinya itu mengurai dan menjelaskan siapa-siapa saja berhak untuk membeli, mengkonsumsi BBM bersubsidi.

Di sini juga perlu kami tekankan Pak, tidak hanya mengurai saja, menjelaskan, mendeskripsikan, tetapi juga memberikan sanksi hukum Pak. Memberikan sanksi hukum kepada, satu mereka yang menjual dan kedua siapa yang membeli juga. Jadi itu saya kira harus ada *different-nya* yang jelas dalam hal ini.

Berikutnya Pak Menteri, ini agak banyak tapi kecil-kecil Pak, pipa Cisem Pak. Pipa Cisem saya kira dengan adanya pentuntasan pembangunan pipa Cisem sampai tersambung ke Cirebon bisa mengurai berbagai permasalahan kekurangan gas yang ada di Jawa Barat. Jadi saya kira ini salah satu prioritas yang juga menjadi perhatian kami Pak, terutama yang akses Jargas yang di Jawa Timur bisa disalurkan ke Jawa Barat.

Berikut tadi juga Pak Menteri menyampaikan mengenai PLN Batam, memang Pak Menteri saya, kami sudah membaca bahwa ada kebijakan dari pemerintah untuk menunda kenaikan harga listrik sampai dengan Juni 2024, mengingat daya beli masyarakat dan lain-lain, tetapi juga perlu kita *highlight* di sini Pak Menteri bahwa PLN Batam sebagai *going concern* itu juga perlu diperhatikan karena saat ini mereka masih tetap *bleeding* dengan kondisi seperti ini dan ini juga saya kira perlu mendapatkan perhatian. Salah satunya juga mungkin bisa dipertimbangkan Pak HGBT 6 dolar per MMBTU diberikan pada PLN Batam.

Dan terakhir kepada Ibu Dirjen EBTKE, kami berharap dalam waktu dekat bisa melakukan rapat dengan pendapat dengan ibu karena bagi kami masalah kemandirian energi dan transisi energi itu topik yang amat sangat kami fokuskan di Komisi VII. Apalagi masalah transisi energi ini kami rasakan prosesnya masih tersendat-sendat, ya saat ini kita juga masih apa namanya kebutuhan dananya untuk transisi energinya besar ya, saat ini juga penggunaan dari batubara atau energi fosil juga masih sangat besar. Jadi saya kira akselerasi kita untuk melakukan transisi energi itu perlu kami dapatkan masukannya dari Ibu selaku pejabat di Ditjen EBTKE.

Mungkin itu Pak Menteri, saya kira dalam kesempatan ini mungkin kita sudah bisa akhiri apa yang disampaikan oleh teman-teman dan kami menunggu jawaban dari Pak Menteri. Kami persilakan Pak Menteri, mungkin mengingat waktu bisa dijawab singkat saja nanti sisanya bisa dijawab secara tertulis.

Silakan Pak Menteri.

#### **MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):**

Baik, terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati.

Perkenankan kami untuk merespons tadi masukan-masukan yang tadi disampaikan yang memang semua masukan adalah masukan yang membangun dan tentu saja akan kami tindaklanjuti.

Pertama, kami merespon dulu pertanyaan mengenai PJUTS tadi ada beberapa Anggota yang telah menyampaikan. Memang di tahun 2023 ini pembangunan PJUTS menghadapi kendala kendala, kendala yang utama adalah kemampuan dari pada pemasok. Yang sebelumnya itu kita mempunyai impresi, bahwa pemasukan ini mempunyai kapasitas, kemampuan ternyata tidak *perform* ya dan juga kami juga sering melakukan evaluasi ya.

Jadi 5 paket ke yang keseluruhannya menggunakan PMK Nomor 109 Tahun 2023 ya itu pemberian kesempatan penyelesaiannya sampai 31 Maret. Jadi kita terus dorong, sesudah 31 Maret ini kita upayakan akan kita selesaikan selisih yang dari 31.075 dan yang sudah selesai 24.499. Jadi tahun sisanya ini



akan kami lanjutkan untuk bisa sampai selesai ya, jadi memang kita sedang meminta pertanggungjawaban dari pada kontraktor.

Ada tiga kontraktor yang memang tidak perform dan untuk itu memang kita akan melakukan sanksi dan kami sudah melakukan evaluasi juga terhadap tim pengadaan yang di dalam dan sudah ada dalam waktu dekat akan dilakukan perubahan-perubahan.

**F-GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):**

Dan kontraktor ini di *blacklist* saja Pak Menteri.

**MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):**

Itulah yang memang kita apa, *nah* cuman juga kriterianya bahwa pelaku usaha besar ini akan kita evaluasi kembali sehingga bisa memberikan juga pelaku usaha yang menengah. Jadi kita menganggap level mampu besar tapi ternyata kapasitasnya tidak sebesar yang kita harapkan. Jadi itu yang mengenai PJUTS dan mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan dalam tempo yang cepat di tahun 2024.

Kemudian yang topik mengenai IUP, IUP cabut hidup istilahnya. Jadi memang sesuai dengan Pasal 119, sebagaimana tadi disampaikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 ini nanti dapat mencabut IUP yang tidak memenuhi kewajiban ya, juga antara lain mengalami kepailitan dan juga mengalami masalah pidana. Jadi sesuai dengan Rapat Kabinet, jadi arahan terkait dengan pelayanan satu pintu yang mana ini sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2015. Kementerian ESDM mendelegasikan ke BKPM yang juga sesuai dengan Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2015, yang direvisi menjadi Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2020. Ini diperkuat lagi dengan Keppres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Investasi, itu ada di Pasal 3.

Di mana Menteri BKPM berdasarkan rekomendasi ya di mana Kementerian ESDM sebagai salah satu anggota dari Satgas dapat mencabut IUP. Jadi telah kami sampaikan tadi bahwa dari 2.078 yang dicabut itu adalah yang memang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan, baik dari operasi maupun juga dari lingkungan. Jadi itu, itu yang saat ini terjadi.

Kemudian juga tadi dari Pak.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Interupsi Pak Ketua.

Pak Menteri, kalau untuk menghidupkan rekomendasi juga ya dari Menteri ESDM?





**MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):**

Jadi dari *requirement*-nya, yang ada pada kami adalah data yang ada pada saat itu. Jadi sebelumnya izin-izin itu dikeluarkan oleh daerah dan kemudian dari Undang-Undang 3/2020 semuanya ditarik ke pusat. *Nah* kami apa yang data yang diperoleh pada saat itu ya yang dari daerah itulah yang kita gunakan sebagai acuan untuk melakukan langkah pencabutan. *Nah* itupun kami memberikan waktu untuk berekonsiliasi, jadi mereka masih diberikan kesempatan untuk bisa memberikan alasan-alasannya dan kalau itu kuat, itu akan dikembalikan kembali.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Pak Ketua, interupsi.

Maksud saya tadi untuk pencabutan, BKPM mereferensi rekomendasi dari Menteri ESDM.

**MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):**

Iya.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Sesudah itu *kan* BKPM juga ada menghidupkan kembali yang sudah dicabut, *nah* itu rekomendasi dari Menteri ESDM juga Pak?

**MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):**

Itu kalau sudah memenuhi kriteria-kriteria yang sudah menjadi acuan kita.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Maksud saya rekomendasi itu dari Menteri ESDM atau langsung diputuskan sendiri oleh BKPM.

**MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):**

Jadi Satgas itu bisa memutuskan asal sesuai dengan rekomendasi yang sudah disepakati, persyaratan-persyaratan yang tadi setelah kami sampaikan dalam paparan.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Oh jadi bisa diputuskan sendiri oleh Kepala BKPM ya.

**MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):**

Dan itu pemberitahuan ditembuskan kepada Kementerian ESDM.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Jadi tidak perlu rekomendasi dari Menteri ESDM kalau menghidupkan lagi.

**MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):**

Karena sekarang sudah memenuhi, jadi tidak ada dua *chanel* lagi karena tim kami juga ada di sana.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Cukup tinggi otoritasnya kalau *gitu*.

**MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):**

Hanya itu hanya untuk yang 2.078 ini, sisanya itu tetap menjadi wewenang, di luar dari itu tetap wewenang Kementerian.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Maksudnya 2.078 IUP?

**MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):**

Iya, itukan yang data hasil daripada evaluasi kita pada saat ditarik dari kewenangan dari daerah ke pusat. Data-data perusahaan itu dia menunjukkan mereka tidak memenuhi persyaratan, antara lain RKAB tahun 2017 tidak ada sejak 2017, kemudian ada yang sudah pailit dan lain sebagainya.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Pak Ketua, maaf.

Jadi memang tadi untuk mencabut rekomendasi dari Menteri ESDM, tapi menghidupkan tidak perlu rekomendasi. Memang terjadi seperti ini juga memang beberapa perundang-undangan *overlapping*, itu memang problem di negara ini karena saya mengikuti juga.

Saya dulu ikut membuat Undang-Undang Minerba Tahun 2009 Pak, itu 5 tahun kami proses termasuk soal hilirisasi. Iya 2004 diproses, mulai 2004 Desember selesai 2009, 5 tahun Pak prosesnya itu. Waktu itu Pak Ridwan jadi Ketua DPRD provinsi Jawa Timur, saya di sini memproses itu. Soal hilirisasi itu sudah ada tahun 2009.

Jadi kita ini memang itu jadi tidak mudah memang problemnya seperti ini, saya lihat beberapa perundangan juga *overlapping*, memang ini persoalan bangsa ini. Kalau saya melihat lebih jauh lagi jadi makanya target yang ada sekarang beda dengan target yang dulu sudah dibuat tahun 2009. Nanti

mundur-mundur lagi nih target, jadi memang ya birokrasi juga kita menghadapinya tidak mudah juga Pak Ketua.

*Nah* ini persoalan nanti untuk nanti itu ini persoalan juga, termasuk seperti ini. Jadi kadang-kadang referensi dari jadi pelaku usaha memang jadi lemah kadang-kadang, padahal dibutuhkan pelaku-pelaku usaha yang kompetitif, baik tingkat daerah, nasional, regional atau global. *Nah* ini tapi ini kan semua sangat tergantung terhadap perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan yang dibuat Pak Menteri, jadi ini sebenarnya persoalan bangsa ini.

Kalau saya melihat lebih mendasar kalau sudah seperti ini, biarpun selama ini **(suara tidak jelas 2.07.21 rekaman terputus)** memang jadi banyak yang rumit, memang yang diperlukan sebenarnya sikap-sikap yang tegas, misalnya seperti tadi yang dikeluhkan oleh teman-teman ya misalnya argumentasi dari Kementerian ESDM, juga Kementerian ESDM di rata-rata saya kira harus tegas juga, harus kuat *gitu*. Kalau *nggak* ya akhirnya banyak tarik-menarik, jadi *resultante*-nya tidak sesuai dengan apa poinnya utama *gitu*. Jadi bisa tarik ke sana *resultante*-nya, bisa ke kiri tergantung sumbu siapa yang kuat *gitu* kalau pakai terminologi matematika.

Begitu Pak Ketua, terima kasih.

#### **MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):**

Baik, terima kasih masukannya.

Terus kemudian juga tadi mengenai dari Ibu Diah, Bu Ratna jadi mengenai Jargas dan juga motor listrik. Yang memang Jargas ini kita evaluasi, yang memang kalau *nggak* menggunakan APBN selama ini pasti kemampuan mencapainya terbatas. Untuk itu sekarang sedang kita evaluasi ya bagaimana kita juga bisa mengundang pihak non-APBN ya dengan skema KPBU.

*Nah* untuk itu memang diperlukan beberapa kebijakan, antara lain: penetapan harga daripada gas untuk inputannya, kemudian juga perlu juga ada regulasi mengenai keringanan biaya transmisi daripada gas ini ya sehingga memang gas itu masuk di *inlet* pemakainya itu bisa kompetitif dengan LPG.

*Nah* ini sedang kami kaji dan mungkin dalam waktu dekat akan kita keluarkan aturannya, mudah-mudahan ini bisa menarik investor untuk bisa bekerja sama secara KPBU dan kalau ini bisa besar, ini memang akan jumlah besar sambungan rumah itu bisa dicapai tidak seperti yang sekarang ini yang puluh-puluh ribuan aja.

*Nah* untuk itu memang kita perlu seperti yang disampaikan Pak Pimpinan tadi untuk menyelesaikan sambungan transmisi pipa-pipa utama dengan kondisi yang kompetitif. *Nah* itu antara lain kita menyelesaikan nanti Cirebon-Semarang dan selanjutnya nanti di Dumai-Seimangke di tahun depan ya, kita udah masuk ke usulan untuk bisa diselesaikan untuk merespons nanti gas yang berasal dari Blok Andaman.

Dengan itu nanti kota-kota besar nanti bisa lewati dan kita bisa pasang cabang-cabangnya untuk bisa disambung Jargas asal harga hulunya bisa masuk, sehingga bisa memenuhi keekonomian daripada investor. Jadi ini yang sedang kita lakukan evaluasi.

*Nah* kemudian tadi yang motor listrik yang 10, ini bukan lucu-lucuan Ibu Diah. Memang pengalaman kita yang kemarin ini dikasih 150.000 unit, memang itu agak, baru di anggarannya baru disediakan April 2023. *Nah* sementara kita masih menyediakan infrastrukturnya, kita lakukan *opening* registrasi untuk mereka yang mau melakukan konversi, peminatnya banyak tetapi sesudah memang dicek di polisi surat-suratnya *nggak* lengkap semua.

Jadi kebanyakan memang motor-motor tua, motor-motor tua kita tuh statusnya *nggak* legal *gitu* ya, bodong. Jadi memang kita siapkan rumahnya 10, sementara kita sedang menyiapkan infrastruktur pendukungnya ya. Kemampuan bengkel sekarang sudah cukup mengagumkan ya sudah bisa mengkonversi dalam tempo 3 jam-4 jam untuk satu kendaraan.

Dan kemudian juga sudah regulasi, mudah-mudahan udah dilakukan oleh kepolisian dan juga dari pihak Perhubungan. Mudah-mudahan ini bisa bergerak dan kita kalau ada, udah ada tambahan lagi ini kita sudah sediakan rumahnya walaupun baru 10, anggarannya 10, 10 unit aja ya tapi ada rumahnya dulu.

#### **F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Sedikit interupsi Pak Ketua.

Tadi soal gas Pak Menteri, saya mau nanya pernah *nggak* Pak Menteri ESDM rapat koordinasi dengan Menteri Pertanian terkait gas ke pabrik-pabrik pupuk, karena problem para petani kita harga pupuk yang tinggi. Saya *kan* mengalami nih saya undang dari pabrik pupuk ke dapil saya karena sulitnya mendapatkan pupuk. Kadang-kadang pabrik pupuk juga ini ada SKK nih dapat gas juga tidak mudah Pak SKK Migas.

Saya punya pengalaman tuh melalui Pak Menteri, nah ini semuanya problem-problem padahal kita ada satu sisi mau punya apa namanya kemandirian pangan *gitu*. Itu problem Pak karena saya sampai bawa bos pabrik pupuk saya bawa ke Dapil saya, dua kabupaten karena saya ada saya bantu dia, dia hampir macet dapat gas.

Saya bilang saya *nggak* perlu kamu traktir, kamu saya traktir tapi ada *kan* acara di dapil saya, jelaskan kepada ribuan petani di depan saya. Dijelaskan soal pupuk bahwa tahun ini harus tersedia musim tanam sampai April ini pupuk tersedia untuk petani-petani di dapil saya karena sulitnya mereka. *Nah* itu padahal persoalannya di gas Pak Menteri, *nah* itu pernah *nggak* rapat koordinasi?

**MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):**

Baik, jadi boleh kami sampaikan masalah gas tidak pernah ada persoalan *supply* ke pupuk Pak Ramson. Kami selalu memprioritaskan gas untuk pupuk, kalau pupuk langka ini mungkin karena alokasi pupuk subsidiya itu dipotong.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Harganya Pak Menteri.

**MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):**

Yang dari 9,5 juta ton alokasinya dulu, hanya tahun ini hanya 4,5 juta ton. Jadi banyak pupuk subsidi yang dipotong dan sekarang *alhamdulillah* sudah dikembalikan dengan anggaran 14 triliun itu kembali.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Tapi itu masih masalah pas musim-musim tanam.

**MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):**

*Nggak* kalau pupuk, ini walaupun bukan bidang saya lagi sekarang tapi sudah diminta untuk mengalokasikan ya. Cuma memang karena yang, yang disubsidi hanya 4,5 juta ton maka sisanya itu *kan* jadi yang non subsidi, yang harusnya 9,5 juta ton. Kalau gas kami udah, kami dulu di pupuk sama Pak Ramson susah juga dulu dapat gas, sekarang saya *nggak* mau susah dapat gas.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Tapi mereka masih mengeluh, Pak.

**MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):**

Iya itu keluhannya masalah ketersediaan pupuk subsidiya ya.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Ya, pabrik pupuknya, soal harga masih mengeluh juga.

**MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):**

Iya karena memang yang tidak subsidi dijual harga komersial, itu yang kemudian dan jumlahnya juga kalau dulu jumlah pupuknya itu mungkin ada 5 jenis, 6 jenis pupuk yang disubsidi, sekarang *kan* tinggal 2. *Nah* kami kembalikan lagi oleh Pak Mentan itu.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Mudah-mudahan dengan Mentan yang baru ini.

**MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):**

*Insy* Allah.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Nanti selanjutnya baik lagi karena saya udah beritahu ke petani akan lebih baik.

Terima kasih Pak Menteri.

**F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):**

Izin Pimpinan.

Pak terkait jawaban Pak Menteri, untuk Jargas tunggu ada *policy* kebijakan rate harga dan juga ingin ada yang, tiap swasta. *Nah* pertanyaan saya Pak, dulu *kan* pipa untuk Cisem ini *kan* banyak yang mau dikerjakan oleh swasta, justru kenapa diambil lewat APBN, dia cukup besar loh hampir 1 triliun. Justru yang ini menurut saya dilanjutkan saja ke swasta, yang untuk rakyat ya dikerjakan di APBN seperti yang disampaikan oleh Bu Diah tadi.

Ini pertanyaan saya, kenapa ini justru tidak swasta *gitu*? Padahal saya dengar dulu ini banyak swasta yang berminat, ingin klarifikasi dari Pak Menteri.

Terima kasih, Pimpinan.

**MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):**

Jadi begini Ibu Andi, kalau diserahkan kepada swasta kalau untuk hak *transmission* utama itu biaya transmisinya akan mahal, ya bisa 2 dolar, bisa 2,5 dolar, sebagaimana yang selama ini terjadi dan itu menyebabkan gas hilirnya mahal.

*Nah* kalau pakai APBN, *nah* itu kita hanya memperhitungkan ongkos daripada *operating and maintenance* saja, paling hanya 40 sen biaya, biaya, biaya operasinya, jadi itu bedanya. Jadi kalau memang swasta jadi mahal nanti ke hilir-hilirnya.

*Nah* itulah yang menyebabkan memang kita industri-industri itu banyak jarang yang masuk ke Indonesia untuk di masuk-masuk di apa kawasan-kawasan industri karena memang infrastruktur kita tidak mendukung harga energinya mahal. *Nah* ini yang kita mau rubah supaya bisa menarik investor banyak masuk ke kawasan kita.

Kita punya lahan strategis banyak yang tentu saja sangat strategis untuk di-*invest* untuk kalau industri-industri untuk dibangun dan kita juga punya tenaga kerja yang banyak untuk disiapkan lapangan kerjanya, itu aja. *Nah* cabang-cabangnya nanti baru itu boleh oleh swasta untuk masuk.

*Nah* selain untuk Jargas rumah tangga kita juga sekarang mendorong adanya dikembangkannya CNG ya, CNG ini juga untuk merespon kebutuhan industri untuk mengurangi pemakaian LPG-nya, itu juga sedang kita siapkan.

Mengenai Lisdes ini, listrik desa kami sangat sepakat, kita sangat ingin untuk bisa memberikan pelayanan yang baik, hanya keterbatasannya itu mengenai keberadaan anggaran aja yang memang perlu kita, perlu kita carikan jalan keluarnya karena memang untuk membangun itu, apalagi di daerah-daerah yang, itu memang dibutuhkan biaya yang cukup, cukup, besar.

*Nah* mungkin ini kami mohon dukungan dari Komisi VII DPR RI untuk bisa mendapatkan, tadi disampaikan oleh Pak Willy diperlukan kurang lebih hampir 12 triliun untuk bisa melengkapi keseluruhan desa-desa di kecamatan untuk bisa dilistriki. Itu, itu juga kita perlu membuatkan suatu perencanaannya sehingga bisa, kalau ada anggarannya itu bisa dilaksanakan langsung secara apa, secara *immediate*.

Tadi yang terkait dengan pertanyaan Pak Hendrik, mungkin kami jawab nanti secara tertulis ya karena udah ada sebetulnya itu ini sudah dikenakan PNBP oleh BPH Migas ya, udah ada jumlahnya. Kami juga sepakat bahwa sekarang ini memang mengandalkan sumur-sumur yang ada *lifting* kita memang kinerjanya juga menurun, tapi kami juga sudah ada upaya-upaya dan juga terbukti juga adanya temuan-temuan sumber-sumber gas baru yang cukup besar ya, cukup besar yang akan segera dikembangkan ya.

Jadi ya kita juga bersyukur ada lapangan baru yang ketemu besar di Blok Mahakam, kemudian juga ada lapangan besar yang ditemukan di Blok Andaman dan juga kita melihat potensi untuk memanfaatkan *unconventional* minyak yang ada di kedalaman Rokan yang saat ini sedang dieksplorasi oleh Pertamina dan rekannya dari Amerika.

*Nah* mengenai kewenangan ESDM, kami selalu berpegang pada peraturan-peraturan yang ada di undang-undang ya. Jadi terkait dengan KKP ya tadi kami juga masih belum, belum bersepakat mengenai definisi daripada sedimentasi ya. Jadi sedimentasi itu ya itu kalau dari definisinya dari pertambangan itu *kan* asalnya juga dari aluvial ya dan mengandung banyak mineral ya, kita tidak dan mineral ini dilindungi oleh undang-undang kita. Jadi yang namanya sedimen itu ya mungkin ya lumpur-lumpur kotor yang ada di laut ya, atau juga yang memang mendangkalkan apa, mendangkalkan *channel-channel* perairan yang memang akan membahayakan alur pelayaran.

Jadi mungkin demikian Bapak Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota Komisi VII respon dan sisanya akan dijawab secara tertulis. Terima kasih

**F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):**

Dan saya minta dijawab yang 100 miliar yang tiba-tiba ada itu Pak ya.

**MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):**

Tadi *kan* janjinya tertulis Bu, jadi begini secara umum kalau boleh saya sampaikan secara umum dulu ya. Dulu memang ada rencana untuk melakukan eksplorasi sumber geothermal dengan *slim hole*, tapi kami menganggap bahwa program ini yang dulu 2 biji aja sedang dalam proses lelang. Jadi kami belum melihat bahwa ini ada, dengan keterpepetan waktunya ini belum jadi satu prioritas sebetulnya dan untuk itu kita memang coba untuk alihkan dan sebetulnya anggaran *slim hole* ini masih dalam status blokir.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oke Pak, baik terima kasih Pak Menteri.

Bapak-Ibu sekalian.

Mari ini sudah lewat dari pukul 17.00 WIB yang tadi kita sepakati waktunya, sekarang ini saya kira kita masuk ke tahap pembacaan draf kesimpulan.

Baik, draf kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM RI, Selasa 19 Maret 2024.

1. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk terus meningkatkan kinerja dan melakukan pengawasan terhadap program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat, seperti PJUTS, converter kit, AML dan program-program lainnya.

Bagaimana Ibu-Bapak? Jargas. Pak Menteri bagaimana, setuju? Baik, setuju.

**(RAPAT : SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

2. Komisi VII DPR RI mendukung Menteri ESDM RI untuk mengembalikan kewenangan Kementerian ESDM terkait pencabutan izin usaha pertambangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengingat Kementerian ESDM merupakan kementerian teknis yang lebih memahami permasalahan pertambangan, mineral dan batubara.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Interupsi Pak Ketua.





Ini kan membuat itu bukan Menteri ESDM Pak, jadi mengupayakan aja, mendukung Menteri ESDM untuk mengupayakan mengembalikan kewenangan karena tidak mungkin Menteri ESDM mengembalikan sendiri. Itu apa namanya mensinkronisasi lah dengan yang lain itu, apa ke atas atau ke setara *gitu*.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oke, jadi ditambah ya “untuk mengupayakan mengembalikan kewenangan Kementerian ESDM dan seterusnya”.

Pak Menteri bagaimana, setuju Pak? Baik.

**(RAPAT : SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

Ketiga, ini ada persetujuan yang harus diambil di Komisi VII Ibu-Bapak, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri.

3. Komisi VII DPR RI menyetujui usulan Menteri ESDM RI terkait perluasan golongan tarif pelanggan PLN Persero dalam rangka meningkatkan pelayanan efisiensi dan keandalan tenaga listrik yang lebih optimal bagi masyarakat dengan tidak merubah besaran tarif tenaga listrik yang telah ada.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Interupsi Pak Ketua.

Ini juga terminologi Pak Menteri, perluasan dengan meningkatkan stratifikasinya. *Kan* sebenarnya itu yang ditingkatkan bukan memperluas *kan*, jadi bahasanya kalau memperluas kurang pas tapi kalau menambah stratifikasi pelanggan, tingkatan yang digunakan itu kira-kira *gitu kan* Pak Menteri, bukan memperluas ke samping dia kan.

**MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):**

Tadi ini mempersingkat katanya hanya memperluas, tapi dengan penjelasan ini *kan* jadi lebih.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Pak Menteri, Pak Ketua di draf aja.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Kenapa itu, jadi terkait.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

**(suara tidak jelas 2.25.43)** yang dari sekian, mulai contohnya 900, 1300, terus naik, naik sampai yang penggunaannya lebih tinggi lagi *kan gitu* Pak Ketua, bukan memperluas ke samping *gitu*.

**MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):**

Daftarnya sudah, daftarnya sudah ada tapi berdasarkan, berdasarkan pengelompokan.

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Meningkatkan stratifikasi golongan tarif pelanggan PT PLN ya, iya *oke*. Bagaimana Ibu-Bapak setuju? Pak Menteri setuju ya? Baik.

**(RAPAT : SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

4. Komisi VII DPR RI mendorong Menteri ESDM RI untuk terus melakukan evaluasi tarif listrik pelanggan PLN Batam dengan mempertimbangkan nilai keekonomian yang layak.

Setuju Pak ya? Baik.

**(RAPAT : SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

5. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 26 Maret 2024.

Setuju Pak?

**(RAPAT : SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

Baik, terima kasih Ibu-Bapak Anggota Komisi VII yang hadir dalam kesempatan ini.

Sebelum kami tutup kami persilakan Pak Menteri ESDM RI untuk menyampaikan sambutan penutup.

Silakan Pak.

**MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati.

Terima kasih telah kita simpulkan tadi hasil daripada rapat kerja antara Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR RI. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Ibu-Bapak Anggota Komisi VII DPR RI yang telah melakukan pembahasan mengenai:

1. Evaluasi pelaksanaan program Tahun Anggaran 2023;
2. Program prioritas Tahun Anggaran 2024;
3. Pengawasan terhadap proses cabut hidup IUP;
4. Evaluasi tarif listrik untuk industri dan bisnis di Batam;
5. Mencakup hal yang lain-lain.

Kami telah memperhatikan seluruh masukan dari Ibu-Bapak sekalian dan akan segera kami tindaklanjuti agar seluruh permasalahan yang kita bahas hari ini dapat segera kita selesaikan untuk memberikan solusi terbaik untuk negara. Selain itu pertanyaan Ibu-Bapak sekalian akan kami siapkan secara lebih lengkap melalui jawaban tertulis yang akan kami sampaikan sesuai dengan jadwal yang telah kita sepakati bersama.

Terima kasih.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Menteri beserta seluruh jajarannya atas kerjasamanya dalam rapat kerja pada hari ini.

Dengan demikian kami menyatakan rapat kerja pada hari ini ditutup.

*Billahittaufik walhidayah,*

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.29 WIB)  
(KETOK PALU 3 KALI)**

a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,

Dwiyanti, S.Sos.  
NIP. 196903131990032002

